



No. Publikasi : 9109.11.03
Katalog BPS : 1413:9109

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN TAMBORA 2010



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SORONG

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA - KABUPATEN TAMBORA 2010

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2010

Nomor Publikasi : 9109.11.03
Katalog BPS : 1413.9109
Ukuran Buku : 16,5 x 21,5 cm
Jumlah Halaman : v rumawi + 99 halaman

Naskah :

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sorong

Diterbitkan oleh :

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sorong

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya.



BUPATI TAMBRAUW

SAMBUTAN

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, saya menyambut gembira diterbitkannya publikasi ***Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tambrau 2010*** oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sorong bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tambrau.

Data dan informasi statistik yang disajikan dalam publikasi ini sangat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrau di dalam merumuskan kebijakan pembangunan, khususnya pembangunan manusia di Kabupaten Tambrau serta mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan program pembangunan manusia telah mampu meningkatkan kualitas manusia terutama pada derajat kesehatan, pendidikan dan kemampuan ekonomi masyarakat.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu hingga selesainya publikasi ini saya sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Fef, November 2011
BUPATI TAMBRAUW

GABRIEL ASSEM, SE, M.Si

KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN TAMBRAUW

SAMBUTAN

Meningkatnya pelaksanaan program pembangunan di segala bidang menuntut tersedianya data statistik yang lengkap, akurat, mutakhir, dan berkesinambungan terutama guna menunjang terwujudnya perencanaan yang tepat, pengawasan yang baik, serta evaluasi kritis terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai

.Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sorong telah berusaha menyajikan gambaran tentang sumber daya manusia dan komponen-komponen yang digunakan dalam penyusunan indeks pembangunan manusia di Kabupaten TambrauW untuk memberikan gambaran perkembangan pembangunan manusia dalam publikasi ***Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten TambrauW Tahun 2010***.

Data dan informasi statistik yang dicakup dalam publikasi ini, tentunya sangat dibutuhkan oleh berbagai konsumen data. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada BPS Kabupaten Sorong dan semua pihak yang telah membantu terbitnya publikasi ini.

Semoga publikasi ini bermanfaat.

TambrauW, Oktober 2011
Ketua Bappeda
Kabupaten TambrauW

SONY RUMFAKER, S.Sos, M.Si

KATA PENGANTAR

Publikasi **Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tambrau Tahun 2010** ini tersaji atas kerjasama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sorong dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tambrau. Secara garis besar publikasi ini memberikan gambaran umum mengenai kondisi pembangunan manusia di Kabupaten Tambrau Tahun 2010.

Data dan informasi yang disajikan terdiri dari situasi pembangunan manusia di Kabupaten Tambrau, hasil penghitungan pencapaian IPM serta implikasi kebijakan terhadap pembangunan manusia.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga terbitnya publikasi ini, kami sampaikan terima kasih. Saran yang membangun sangat kami harapkan guna perbaikan di masa mendatang.

Tambrau, Oktober 2011

**Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Sorong**



UDDANI MALEWA, SE

NIP. 19580812 199003 2 001

Daftar Isi

Sambutan Bupati Tambrauw	i
Sambutan Ketua Bappeda Kabupaten Tambrauw	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
I. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Sasaran	4
1.3 Manfaat Penulisan	5
1.4 Ruang Lingkup	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
II. Metodologi	10
2.1 Sejarah Penghitungan IPM	10
2.2 Sumber Data	10
2.3 Metode Penyusunan Indeks	11
2.4 Besaran Skala IPM dan Reduksi <i>Shortfall</i>	24
2.5 Beberapa Definisi Indikator Terpilih	25
III. Gambaran Umum Sosial Ekonomi	31
3.1 Kependudukan	31
3.1.1 Jumlah dan Komposisi Penduduk	32
3.1.2 Sebaran Penduduk	36
3.2 Ketenagakerjaan	37
3.2.1 Tingkat partisipasi Angkatan Kerja	37
3.2.2 Tingkat Kesempatan Kerja	38
3.2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka	39
3.2.4 Penduduk Bekerja	41
3.3 Kondisi Kesehatan	45
3.3.1 Indikator Kesehatan	45
3.3.2 Situasi Sumber Daya Kesehatan	51
3.4 Kondisi Pendidikan	55
3.4.1 Angka Partisipasi Sekolah	55
3.4.2 Angka Partisipasi Kasar	57
3.4.3 Angka Partisipasi Murni	58

3.4.4	Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan	60
3.4.5	Rasio Murid terhadap Guru dan sekolah	62
3.5	Kondisi Perumahan	64
3.5.1	Luas Lantai	64
3.5.2	Jenis Lantai	65
3.5.3	Jenis Dinding	66
3.5.4	Sumber Penerangan	67
3.5.5	Fasilitas Air Minum	68
3.5.6	Sumber Air Minum	69
3.5.7	Fasilitas Tempat Buang Air Besar	70
3.6	Pengeluaran dan Konsumsi	71
IV	Pencapaian Kinerja Pembangunan Manusia	75
4.1	Perkembangan Komponen Kesehatan	76
4.2	Perkembangan Komponen Pendidikan	78
4.2.1	Perkembangan Angka Melek huruf	78
4.2.2	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah	79
4.3	Perkembangan Paritas Daya Beli	81
4.4	Perkembangan IPM)	83
V	Implikasi Kebijakan	88
5.1	Identifikasi Masalah Pembangunan	88
5.2	Upaya Mengatasi Masalah Pembangunan	91
VI	Penutup	96

BAB

1

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya dan tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini tampaknya merupakan suatu kenyataan yang sederhana, namun seringkali terlupakan oleh kesibukan jangka pendek yang berorientasi pada hal-hal yang bersifat materi.

Paradigma tentang pembangunan telah mengalami pergeseran dari waktu ke waktu, yaitu dari pembangunan yang berorientasi pada produksi (*production centered development*) pada dekade 60-an ke paradigma pembangunan yang lebih menekankan pada distribusi hasil-hasil pembangunan (*distribution growth development*) selama dekade 70-an. Selanjutnya pada dekade 80-an, muncul paradigma pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (*basic need development*), dan akhirnya menuju paradigma pembangunan yang terpusat pada manusia (*human centered development*) yang muncul pada tahun 1990-an.

Pembangunan manusia (*human development*) dirumuskan sebagai perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging the choice of*

people), yang dapat dilihat sebagai proses upaya ke arah “perluasan pilihan” dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut (UNDP, 1990). Di antara berbagai pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Konsep pembangunan manusia yang sesungguhnya adalah menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, dan bukan sebagai alat bagi pembangunan. Hal ini berbeda dari pembangunan yang memberikan perhatian utama pada pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia memperkenalkan konsep yang lebih luas dan lebih komprehensif yang mencakup semua pilihan yang dimiliki oleh manusia di semua golongan masyarakat pada semua tahapan pembangunan. Pembangunan manusia juga merupakan perwujudan tujuan jangka panjang dari suatu masyarakat, dan meletakkan pembangunan di sekeliling manusia, bukan manusia di sekeliling pembangunan.

Paradigma pembangunan manusia mengandung 4 (empat) komponen utama :

a. Produktifitas

Manusia harus berkemampuan untuk meningkatkan produktifitasnya dan berpartisipasi secara penuh dalam mencari penghasilan dan lapangan kerja. Oleh karena itu

pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan manusia.

b. Pemerataan/ ekuitas

Setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapuskan. Sehingga semua orang dapat berpartisipasi dan mendapat keuntungan dari peluang yang sama.

c. Keberlanjutan

Akses terhadap peluang/kesempatan harus tersedia bukan hanya untuk generasi sekarang tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Semua sumber daya harus dapat diperbaharui.

d. Pemberdayaan

Pembangunan harus dilakukan oleh semua orang, bukan semata-mata dilakukan untuk semua orang. Semua orang harus berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan dan proses yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Penyertaan konsep pembangunan manusia dalam kebijakan-kebijakan pembangunan sama sekali tidak berarti meninggalkan berbagai strategi pembangunan terdahulu, yang antara lain untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan mencegah perusakan lingkungan. Perbedaannya adalah bahwa dari sudut pandang pembangunan manusia, semua tujuan tersebut di atas diletakkan dalam kerangka untuk memperluas pilihan-pilihan

bagi manusia. Agar konsep pembangunan manusia dapat diterjemahkan ke dalam perumusan kebijakan, pembangunan manusia harus dapat diukur dan dipantau dengan mudah.

Human Development Report (HDR) global telah mengembangkan dan menyempurnakan pengukuran statistik dari pembangunan manusia, yang meliputi: lamanya hidup (*longevity*), pengetahuan/ tingkat pendidikan (*knowledge*) dan standar hidup (*decent living*). Untuk memperoleh gambaran tentang pembangunan manusia di Kabupaten Tambrauw, maka disusunlah publikasi **"Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tambrauw tahun 2010"**, yang diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam penentuan kebijakan pembangunan di Kabupaten Tambrauw.

1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari penulisan ini adalah menyajikan data dan informasi tentang konsep penduduk dan permasalahannya, sebagai dampak dari pembangunan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Tambrauw. Selanjutnya diharapkan dapat menjadi masukan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan sumber daya manusia di Tambrauw, termasuk penentuan sektor-sektor prioritas dalam pembangunan manusia.

Sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan publikasi ini meliputi :

- a. Teridentifikasinya kondisi beberapa variabel sektoral dalam pembangunan manusia, meliputi sektor-sektor : kesehatan, pendidikan dan ekonomi di Kabupaten Tambrauw.
- b. Memberikan gambaran permasalahan yang ada di bidang pembangunan manusia di Kabupaten Tambrauw.
- c. Diperolehnya gambaran tentang perkembangan ukuran pembangunan manusia (IPM) dan indikator-indikator sosial lainnya di Kabupaten Tambrauw.
- d. Terumuskannya implikasi masalah dan kebijakan untuk menangani berbagai masalah yang merupakan bagian dari perencanaan dan penanganannya pembangunan manusia.

1.3 Manfaat Penulisan

Manfaat yang ingin dicapai dari penyusunan publikasi ini adalah:

- a. Tersedianya data dan informasi yang dibutuhkan dalam memantau proses pembangunan manusia di Kabupaten Tambrauw secara berkesinambungan.
- b. Selain sebagai sumber informasi dalam pemantauan pembangunan manusia, data dan informasi dalam

publikasi ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam perencanaan pembangunan manusia pada tahap pembangunan selanjutnya.

- c. Publikasi ini dapat dijadikan rujukan atau referensi keilmuan bagi masyarakat pendidikan

1.4 Ruang Lingkup

1.4.1 Lingkup Materi

Ruang lingkup materi penulisan ini meliputi :

- a. Identifikasi kondisi variabel kunci dalam pengukuran besaran IPM yang meliputi : lamanya hidup (*longevity*), pengetahuan/ tingkat pendidikan (*knowledge*) dan standar hidup (*decent living*).
- b. Identifikasi permasalahan mendasar pada sektor-sektor kunci yang terkait dengan IPM, meliputi indikator kesehatan, pendidikan dan ekonomi.
- c. Pengukuran besaran angka IPM Kabupaten Tambrauw.
- d. Analisis Situasi Pembangunan Manusia di Kabupaten Tambrauw.
- e. Rumusan kebijakan dalam rangka pembangunan manusia berdasarkan besaran angka IPM yang diperoleh dan analisis situasi pembangunan manusia di Kabupaten Tambrauw.

1.4.2 Lingkup Wilayah

Lokasi penelitian mencakup wilayah Kabupaten Tambrauw pada kurun waktu tahun 2010.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan publikasi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tambrauw Tahun 2010 disusun dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan merupakan bab permulaan yang dimulai dengan latar belakang pentingnya penyusunan publikasi yang menggambarkan proses pembangunan manusia di Kabupaten Tambrauw. Ulasan selanjutnya dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat dari publikasi ini. Bab ini ditutup dengan sistematika penulisan.

Bab II Metodologi mengulas sumber data, sejarah penghitungan IPM dan metode penyusunan indeks. Metode penghitungan masing-masing komponen IPM juga disertakan dalam sub bab metode penghitungan IPM.

Bab III Kondisi Umum Pembangunan Manusia di Kabupaten Tambrauw, memberikan gambaran secara lengkap hasil-hasil pembangunan manusia. Pembahasan difokuskan bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian.

Bab IV Pencapaian Kinerja Pembangunan Manusia, memberikan gambaran tentang perkembangan komponen-komponen penyusun IPM serta pencapaian IPM.

Bab V Implikasi Kebijakan, memberikan gambaran tentang identifikasi masalah pembangunan manusia dan upaya-upaya mengatasinya.

Publikasi ini ditutup dengan Bab VI. Bab Penutup ini terdiri dari sub bab kesimpulan dan saran yang berisi ringkasan sekaligus sebagai jawaban atas tujuan dari penyusunan publikasi ini.

BAB

2

METODOLOGI

BAB II METODOLOGI

2.1 Sejarah Penghitungan IPM

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pertama kali diperkenalkan pada tahun 1990 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui laporan pembangunan manusia (*Human Development Report*) dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan pembangunan kualitas manusia di 177 negara.

Di Indonesia, pemantauan pembangunan manusia mulai dilakukan pada tahun 1996. Laporan pembangunan manusia tahun 1996 memuat informasi pembangunan manusia untuk kondisi tahun 1990 dan 1993. Cakupan laporan pembangunan manusia terbatas pada level provinsi. Mulai tahun 1999, informasi pembangunan manusia telah disajikan sampai level kabupaten/kota.

2.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam publikasi ini adalah:

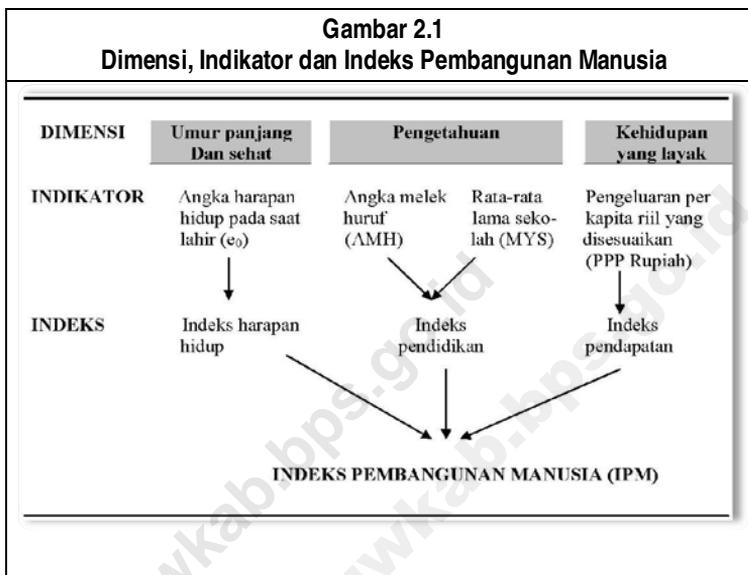
- a. Susenas Kor: digunakan untuk menghitung indikator seperti angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, dan penghitungan pengeluaran per kapita.

-
- b. Susenas Modul Konsumsi: digunakan untuk menghitung daya beli masyarakat Kabupaten Tambrauw yang didasarkan pada 27 komoditas.
 - c. Data sektoral dari instansi terkait penyusunan publikasi Ineks Pembangunan Manusia Kabupaten Tambrauw.

2.3 Metode Penyusunan Indeks

IPM mengukur pencapaian pembangunan manusia dalam tiga dimensi. Ketiga dimensi tersebut adalah dimensi umur panjang dan sehat, dimensi pengetahuan dan kehidupan yang layak. Dimensi umur panjang dan sehat (lama hidup sehat) diukur dengan angka harapan hidup pada saat lahir. Dimensi pengetahuan diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Dimensi kehidupan yang layak diukur dengan paritas daya beli (*purchasing power parity*) yang telah disesuaikan. Penjelasan rinci metode penghitungan masing-masing komponen IPM sebagai berikut:

Gambar 2.1
Dimensi, Indikator dan Indeks Pembangunan Manusia



■ Angka Harapan Hidup pada Saat Lahir

Angka harapan hidup pada saat lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut kelompok umur. Adapun langkah-langkah penghitungan angka harapan hidup adalah:

- a. Mengelompokkan umur wanita dalam interval 15 – 19, 20 – 24, 25 – 29, 30 – 34, 35 – 39, 40 – 44, dan 45 – 49 tahun.
- b. Menghitung rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak masih hidup dari wanita pernah kawin menurut kelompok umur pada poin (1) di atas.

-
- c. Input rata-rata anak lahir hidup dan anak masih hidup pada huruf b pada paket program *MORTPACK* sub program CEBCS.
 - d. Gunakan metode Trussel untuk mendapatkan angka harapan hidup saat lahir. Referensi waktu yang digunakan 3 atau 4 tahun sebelum survei.
 - e. Untuk mendapatkan angka harapan hidup pada tahun 2008 - 2010 dilakukan dengan ekstrapolasi.

■ Angka Melek Huruf

Angka melek huruf adalah proporsi penduduk berumur 15 tahun atau lebih yang dapat membaca huruf latin atau huruf lainnya. Adapun langkah-langkah penghitungan angka melek huruf adalah:

- a. Menghitung jumlah penduduk berumur 15 tahun atau lebih.
- b. Menghitung jumlah penduduk 15 tahun atau lebih yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya.
- c. Membagi jumlah penduduk pada huruf b dengan jumlah penduduk pada huruf a dikalikan 100.

■ **Rata-rata lama sekolah**

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berumur 15 tahun atau lebih untuk menempuh suatu jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Langkah-langkah penghitungan rata-rata lama sekolah sebagai berikut:

- a. Menghitung jumlah penduduk berumur 15 tahun atau lebih.
- b. Melakukan konversi variabel tingkat pendidikan yang ditamatkan ke variabel lama sekolah. Tabel 2.1 menunjukkan tahun konversi dari pendidikan yang ditamatkan.
- c. Menghitung rata-rata lama sekolah dengan melakukan agregat data menggunakan fungsi *mean*.

Tabel 2.1 Tahun Konversi dari Pendidikan yang Ditamatkan

Pendidikan Tertinggi Ditamatkan	Tahun Konversi
1. Tidak pernah sekolah	0
2. Sekolah Dasar	6
3. SLTP	9
4. SLTA/ SMU	12
5. Diploma I	13
6. Diploma II	14
7. Akademi/ Diploma III	15
8. Diploma IV/ Sarjana	16
9. Magister (S2)	18
10. Doktor (S3)	21

■ Paritas Daya Beli yang Disesuaikan

Tingkat kehidupan yang layak dari suatu penduduk dicerminkan oleh ukuran yang disebut Paritas Daya Beli (PPP). Ukuran ini menggambarkan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan. Penyesuaiannya adalah dengan mempertimbangkan keterbandingan antar daerah dan antar waktu. Sebagai catatan,

UNDP menggunakan indikator PDB per kapita riil yang telah disesuaikan (*Adjusted real GDP per capita*) sebagai ukuran komponen tersebut karena tidak tersedia indikator lain yang lebih baik untuk keperluan perbandingan antar negara.

Secara keseluruhan estimasi daya beli penduduk suatu kabupaten dilakukan dengan tahapan berikut :

1. Menghitung pengeluaran per kapita tahun 2010 dari data Kor Susenas (=Y) ;
2. Menaikkan nilai Y sebesar 20% (=Y₁), karena dari berbagai studi diperkirakan bahwa data pengeluaran dari Susenas cenderung lebih rendah sekitar 20% ;
3. Menghitung nilai pengeluaran riil Y₁ dengan mendeflasi Y₁ dengan indeks harga konsumen (CPI) [=Y₂] ;
4. Menghitung nilai daya beli (*Purchasing Power Parity/ PPP*). Penghitungan PPP didasarkan pada harga 27 komoditas yang ditanyakan pada modul konsumsi Susenas. Harga di Jakarta Selatan digunakan sebagai standar harga. Formula penghitungan PPP dituliskan sebagai berikut:

$$PPP / unit = \frac{\sum_{j=1}^{27} E_{i,j}}{\sum_{j=1}^{27} (P_{9,j}^* Q_{i,j})}$$

dengan:

PPP : paritas daya beli

$E_{i,j}$: pengeluaran komoditas ke $-j$ di Kabupaten ke- i

$P_{9,j}$: harga komoditas ke $-j$ di Jakarta Selatan

$Q_{i,j}$: volume komoditi j (unit) yang dikonsumsi di Kabupaten ke- i

Daftar komoditas terpilih untuk penghitungan paritas daya beli ditunjukkan pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2 Daftar Komoditi Terpilih Untuk Menghitung Paritas Daya Beli (PPP)

Komoditi	Unit	Sumbangan terhadap total konsumsi (%)
(1)	(2)	(3)
1. Beras Lokal	Kg	7,25
2. Tepung terigu	Kg	0,10
3. Ketela pohon	Kg	0,22
4. Ikan tongkol/ tuna/cakalang	Kg	0,50
5. Ikan teri	Ons	0,32
6. Daging sapi	Kg	0,78
7. Daging ayam kampung	Kg	0,65
8. Telur ayam	Butir	1,48
9. Susu kental manis	397 gram	0,48
10. Bayam	Kg	0,30
11. Kacang panjang	Kg	0,32
12. Kacang tanah	Kg	0,22
13. Tempe	Kg	0,79
14. Jeruk	Kg	0,39
15. Pepaya	Kg	0,18
16. Kelapa	Butir	0,56
17. Gula pasir	Ons	1,61
18. Kopi bubuk	Ons	0,60
19. Garam	Ons	0,15
20. Merica/lada	Ons	0,13
21. Mie instan	80 gram	0,79
22. Rokok kretek filter	10 batang	2,86
23. Listrik	Kwh	2,06
24. Air minum	M ³	0,46
25. Bensin	Liter	1,02
26. Minyak tanah	Liter	1,74
27. Sewa rumah	Unit	11,56
Total		37,52

Unit kuantitas rumah dihitung berdasarkan indeks kualitas rumah yang dibentuk dari tujuh komponen kualitas tempat tinggal yang diperoleh dari data Susenas Kor. Ketujuh komponen kualitas yang digunakan dalam penghitungan indeks kualitas rumah diberi skor, ditunjukkan pada Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3 Skor Variabel Kualitas dan Fasilitas Rumah dalam Penghitungan Paritas Daya Beli

No	Variabel	Karakteristik	Skor
1	Jenis lantai	Keramik, Marmer, atau Granit	1
		Lainnya	0
2	Luas lantai per kapita	Lebih dari 10 m ²	1
		Lainnya	0
3	Jenis dinding terluas	Tembok	1
		Lainnya	0
4	Jenis atap terluas	Beton/Kayu/Genteng	1
		Lainnya	0
5	Fasilitas penerangan	Listrik	1
		Lainnya	0
6	Fasilitas air minum	Ledeng	1
		Lainnya	0
7	Fasilitas jamban	Milik sendiri	1
		Lainnya	0
8	Skor awal setiap rumah	Rumah	1
		Lainnya	0

Indeks kualitas rumah merupakan penjumlahan skor dibagi dengan delapan. Sebagai contoh, sebuah rumah tangga menempati rumah berlantai tanah (0), berdinding kayu (0), luas lantai per kapita 18 meter per segi (1), beratap seng (0), menggunakan penerangan listrik (1), minum dari air hujan (0), jamban milik sendiri (1). Maka skor indeks kualitas rumah adalah $4/8 = 0,50$. Artinya, kuantitas rumah yang dikonsumsi rumah tangga tersebut adalah 0,50 unit.

5. Menghitung $Y_3 = Y_2/PPP$.
6. Mengurangi Y_3 dengan formula Atkinson sebagai berikut:

Formula Atkinson

$$C_{(i)} = \begin{cases} C_{(i)} & \text{jika } C_{(i)} < Z \\ Z + 2(C_{(i)} - Z)^{(1/2)} & \text{jika } Z < C_{(i)} \leq 2Z \\ Z + 2(Z)^{(1/2)} + 3(C_{(i)} - 2Z)^{(1/3)} & \text{jika } 2Z < C_{(i)} \leq 3Z \\ Z + 2(Z)^{(1/2)} + 3(Z)^{(1/3)} + 4(C_{(i)} - 3Z)^{(1/4)} & \text{jika } 3Z < C_{(i)} \leq 4Z \end{cases}$$

dengan:

$C_{(i)}$ = PPP dari pengeluaran riil per kapita, Y_3 .

Z = Batas pengeluaran yang ditetapkan, biasanya garis kemiskinan.

■ **Menghitung IPM**

- a. Setelah masing-masing komponen IPM dihitung, maka masing-masing indeks dihitung dengan persamaan:

$$\text{Indeks } X_{i,j} = \frac{(X_{(i,j)} - X_{(i-\min)})}{(X_{(i-\max)} - X_{(i-\min)})}$$

dengan:

$X_{(i,j)}$: Indeks komponen ke- i dari kabupaten ke- j ;

$X_{(i-\min)}$: Nilai minimum dari X_i

$X_{(i-\max)}$: Nilai maksimum dari X_i

Nilai maksimum dan minimum dari masing-masing indeks tercantum pada Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4 Nilai Maksimum dan Minimum Indikator dalam Penghitungan IPM

Komponen IPM	Maks.	Min.	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Harapan Hidup	85	25	Standar UNDP
Angka Melek Huruf	100	0	Standar UNDP
Rata-rata Lama Sekolah	15	0	UNDP menggunakan <i>Combined Gross Enrollment Ratio</i>
Daya Beli	732.720 ^a	300.000 (1996) 360.000 ^b (1999)	UNDP menggunakan PDB riil per kapita yang telah disesuaikan

a) Perkiraan maksimum pada akhir PJP II tahun 2018

b) Penyesuaian garis kemiskinan lama dengan garis kemiskinan yang baru

b. Menghitung indeks pendidikan :

$$X_2 = \frac{2}{3}(X_{21}) + \frac{1}{3}(X_{22})$$

dengan:

X_{21} : Indeks Melek Huruf

X_{22} : Indeks Lama Sekolah

c. Nilai IPM dapat dihitung sebagai:

$$IPM = \frac{1}{3} \sum_j Indeks X_{(i)}$$

dengan

Indeks $X_{(i)}$: Indeks komponen IPM ke i

dan

$i = 1$: Indeks angka harapan hidup,

$i = 2$: Indeks pendidikan

$i = 3$: Indeks daya beli

■ Menghitung Reduksi *Shortfall* (r)

Digunakan untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu tertentu. Ukuran ini secara sederhana menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian yang masih harus ditempuh untuk mencapai titik maksimal (IPM = 100). Prosedur penghitungan reduksi Shortfall IPM (= r) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$r = \left[\frac{IPM_{t+n} - IPM_t}{100 - IPM_t} \times 100 \right]^{\frac{1}{n}}$$

dengan:

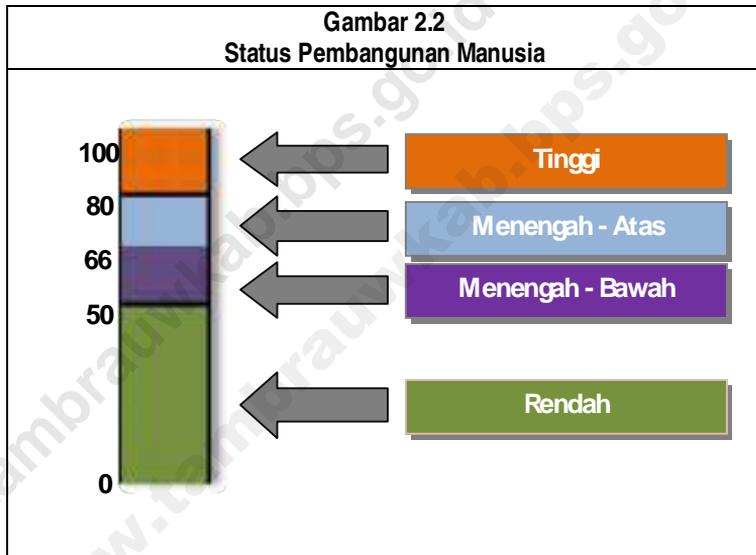
r : reduksi *shortfall*,

IPM_{t+n} : IPM pada tahun ($t + n$)

IPM_t : IPM pada tahun (t)

2.4 Besaran Skala IPM dan Reduksi *Shortfall*

Angka IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Semakin mendekati 100, mengindikasikan suatu wilayah memiliki pembangunan manusia yang semakin baik.



Berdasarkan nilai IPM, UNDP membagi status pembangunan manusia ke dalam tiga kategori, yaitu:

- IPM Tinggi apabila IPM lebih besar dari 80,0
- IPM Menengah apabila IPM antara 50,00 – 79,9
- IPM Rendah apabila IPM kurang dari 50,0

Selanjutnya untuk keperluan perbandingan antar kabupaten/kota, tingkat status menengah dirinci lagi menjadi menengah-

bawah, jika nilai IPM berkisar antara 50,0 – 65,9 dan menengah-atas, jika nilai IPM antara 66,0 – 79,9.

Sedangkan untuk nilai reduksi Shortfall dapat dikategorikan menjadi:

1. Sangat lambat , jika $r < 1,30$
2. Lambat , jika $1,30 \leq r < 1,50$
3. Menengah , jika $1,50 \leq r < 1,70$
4. Cepat , jika $r \geq 1,70$.

2.5 Beberapa Definisi Indikator Terpilih

Untuk dapat melihat dengan jelas dan terarah tentang berbagai permasalahan pembangunan selama ini dan untuk dapat mengimplemen-tasikan program-program pembangunan secara baik dan terukur, maka diperlukan ukuran atau indikator yang handal. Indikator adalah petunjuk yang memberikan indikasi tentang sesuatu keadaan dan merupakan refleksi dari keadaan tersebut

Menurut jenisnya, indikator dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok indikator, yaitu:

- a. Indikator Input, yang berkaitan dengan penunjang pelaksanaan program dan turut menentukan keberhasilan program, seperti: rasio murid-guru, rasio murid-kelas, rasio dokter, rasio puskesmas.

-
- b. Indikator Proses, yang menggambarkan bagaimana proses pembangunan berjalan, seperti: Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), rata-rata jumlah jam kerja, rata-rata jumlah kunjungan ke puskesmas, persentase anak balita yang ditolong dukun.
- c. Indikator *Output/ Outcome*, yang menggambarkan bagaimana hasil (*output*) dari suatu program kegiatan telah berjalan, seperti: persentase penduduk dengan pendidikan SLTA ke atas, Angka Kematian Bayi (AKB), angka harapan hidup, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan lain-lain.

Berikut ini adalah beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan pembangunan manusia:

- **Rasio jenis kelamin** : perbandingan antara penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan, dikalikan 100.
- **Angka ketergantungan** : perbandingan antara jumlah penduduk usia < 15 tahun ditambah usia > 65 tahun terhadap penduduk usia 15 - 64 tahun, dikalikan 100.
- **Rata-rata Lama Sekolah** : lama sekolah (tahun) penduduk usia 15 tahun ke atas.
- **Angka Melek Huruf** : proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang bias membaca dan menulis (baik huruf latin maupun huruf lainnya)
- **Angka Partisipasi Murni SD** : proporsi penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah di SD.

-
- **Angka Partisipasi Murni SLTP** : proporsi penduduk usia 13 - 15 tahun yang sedang bersekolah di SLTP
 - **Angka partisipasi Murni SLTA** : proporsi penduduk usia 16 - 18 tahun yang sedang bersekolah di SLTA
 - **Persentase penduduk dengan pendidikan SLTP ke atas** : proporsi penduduk yang menamatkan pendidikan SLTP atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi
 - **Jumlah penduduk usia sekolah** : banyaknya penduduk yang berusia antara 7 sampai 24 tahun
 - **Bekerja** : melakukan kegiatan/ pekerjaan paling sedikit 1 (satu) jam berturut-turut selama seminggu dengan maksud untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pekerja keluarga yang tidak dibayar termasuk kelompok penduduk yang bekerja.
 - **Angkatan Kerja** : penduduk usia 10 tahun ke atas yang bekerja atau mencari pekerjaan.
 - **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja** : perbandingan angkatan kerja terhadap penduduk usia 10 tahun.
 - **Angka Pengangguran Terbuka** : perbandingan penduduk yang mencari kerja terhadap angkatan kerja.
 - **Persentase pekerja yang setengah menganggur** : proporsi penduduk usia 10 tahun ke atas yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu.

-
- **Persentase pekerja dengan status berusaha sendiri :**
proporsi penduduk usia 10 tahun keatas dengan status berusaha sendiri.
 - **Persentase pekerja dengan status berusaha sendiri dibantu pekerja tidak tetap :** proporsi penduduk usia 10 tahun ke atas dengan status berusaha sendiri dibantu pekerja tak dibayar.
 - **Persentase pekerja dengan status berusaha dengan buruh tetap:** proporsi penduduk usia 10 tahun keatas yang berusaha dengan buruh tetap.
 - **Persentase pekerja dengan status berusaha pekerja tak dibayar:** proporsi penduduk usia 10 tahun ke atas dengan status pekerja keluarga.
 - **Persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga medis :**
proporsi balita yang kelahirannya ditolong oleh tenaga medis (dokter, bidan, dan tenaga medis lainnya)
 - **Angka Harapan Hidup waktu lahir :** perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh sekelompok penduduk
 - **Angka Kematian Bayi :** besarnya kemungkinan bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun, dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup.
 - **Persentase rumah tangga berlantai tanah :** proporsi rumah tangga yang tinggal dalam rumah dengan lantai tanah

-
- **Persentase rumah tangga beratap layak** : proporsi rumah tangga yang menempati rumah dengan atap layak (atap selain dari dedaunan).
 - **Persentase rumah tangga berpenerangan listrik** : proporsi rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik
 - **Persentase rumah tangga bersumber air minum leding** : proporsi rumah tangga dengan sumber air minum leding.
 - **Persentase rumah tangga bersumber air minum bersih** : proporsi rumah tangga dengan sumber air minum pompa/ sumur/ mata air yang jaraknya lebih besar dari 10 meter dengan tempat penampungan limbah / kotoran terdekat.
 - **Persentase rumah tangga berjamban dengan tangki septik** : proporsi rumah tangga yang mempunyai jamban dengan tangki septik.
 - **Pengeluaran** Pengeluaran per kapita untuk makanan dan bukan makanan. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

BAB

3

**GAMBARAN UMUM
SOSIAL EKONOMI**

BAB III

GAMBARAN UMUM SOSIAL EKONOMI

3.1 Kependudukan

Penduduk merupakan faktor yang sangat dominan dalam proses pembangunan. Penduduk memegang dua peranan sekaligus dalam proses pembangunan, yaitu sebagai subyek dan obyek pembangunan.

Sumber daya alam yang tersedia tidak akan mungkin dapat dimanfaatkan tanpa adanya peranan dari manusia. Dengan adanya manusia, sumber daya alam tersebut dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi diri dan keluarga secara berkelanjutan. Besarnya peran penduduk tersebut maka pemerintah dalam menangani masalah kependudukan tidak hanya memperhatikan pada upaya pengendalian jumlah dan pertumbuhan penduduk saja tetapi lebih menekankan ke arah perbaikan kualitas sumber daya manusia.

Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi dan mendatangkan manfaat yang besar bila memiliki kualitas yang baik, namun besarnya jumlah penduduk tersebut dapat menjadi beban yang akan sulit untuk diselesaikan bila kualitasnya rendah. Informasi kependudukan yang baik sangat diperlukan dalam menunjang ke arah pembangunan manusia yang berkualitas.

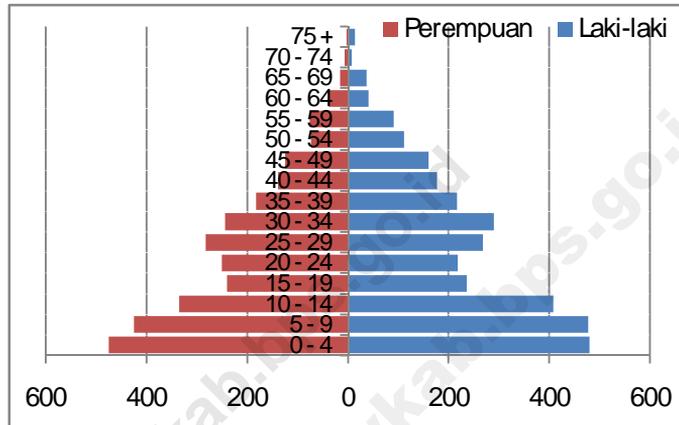
3.1.1 Jumlah dan Komposisi Penduduk

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010, Kabupaten Tambrauw mempunyai penduduk sebanyak 6.144 jiwa, yang terdiri dari 3.227 jiwa penduduk laki-laki dan 2.917 jiwa penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Tambrauw tahun 2010 adalah 111, atau dengan kata lain bahwa untuk setiap 100 penduduk perempuan, terdapat 111 penduduk laki-laki.

Komposisi penduduk Kabupaten Tambrauw menurut struktur umur dan jenis kelamin dapat digambarkan dengan lebih jelas oleh piramida penduduk. Dengan piramida penduduk kita juga dapat melihat tingkat perkembangan penduduk pada setiap kelompok umur dan jenis kelamin. Gambar 3.1 menunjukkan piramida penduduk Kabupaten Tambrauw pada tahun 2010.

Dari Gambar 3.1 terlihat bahwa penduduk Kabupaten Tambrauw tergolong sebagai “penduduk muda”. “Penduduk muda” digambarkan oleh bentuk piramida penduduk dengan alas yang besar dan mengecil dengan cepat pada kelompok umur berikutnya, serta puncak piramidanya lancip pada kelompok umur 65 tahun ke atas. Sebaliknya piramida “penduduk tua” mempunyai alas yang relatif tidak lebar dan perlahan-lahan berkurang pada kelompok umur berikutnya serta puncaknya tumpul.

Gambar 3.1
Piramida Penduduk Kabupaten Tambrauw Tahun 2010

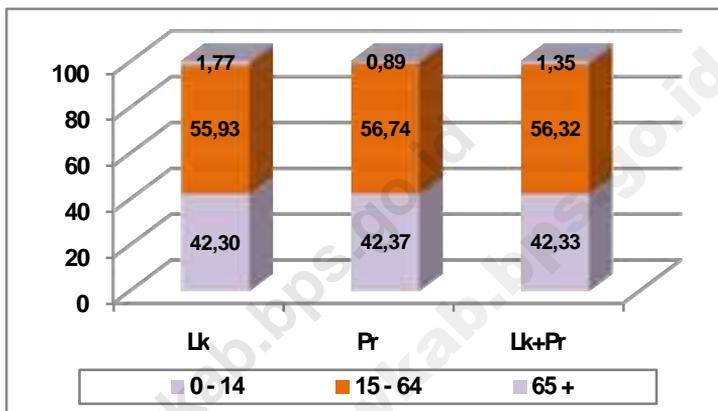


Sumber: BPS, SP-2010

Penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) merupakan suatu modal penting dalam pelaksanaan pembangunan di segala sektor. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010 (SP-2010), sebanyak 56,32 persen penduduk Kabupaten Tambrauw merupakan penduduk produktif, dan sisanya, yaitu 43,68 persen merupakan penduduk non-produktif (0 -14 tahun dan 65 tahun ke atas). Untuk usia produktif masih didominasi oleh penduduk laki-laki. Sebanyak 52,17 persen dari penduduk usia produktif adalah penduduk laki-laki. Sedangkan 47,83 persen dari penduduk usia produktif adalah penduduk perempuan.

Implikasi dari struktur penduduk muda adalah besarnya persentase penduduk yang bersiap memasuki batas penduduk usia kerja (*economically active population*) dan besarnya rasio ketergantungan (*dependency ratio*). Batas bawah usia kerja di Indonesia adalah umur 15 tahun. Setelah memasuki usia tersebut maka mereka disebut sebagai penduduk usia kerja. Penduduk usia kerja dibagi menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga dan melakukan kegiatan lainnya). Bila penduduk usia kerja tidak melakukan salah satu aktivitas dalam kelompok bukan angkatan kerja maka termasuk ke dalam kriteria angkatan kerja. Dan bila dalam angkatan kerja tidak melakukan aktivitas kerja maka kelompok ini termasuk ke dalam kriteria pengangguran (*unemployment*). Dengan jumlah penduduk muda yang besar tentu potensi jumlah penduduk yang akan terjun ke dalam angkatan kerja juga besar, untuk itu pemerintah harus bersiap untuk menyediakan lapangan kerja untuk menampung jumlah angkatan kerja yang besar ini. Hal yang akan terjadi bila permintaan akan tenaga kerja lebih kecil dari jumlah pencari kerja adalah terciptanya pengangguran.

Gambar 3.2
Persentase Penduduk Menurut Kelompok *Dependency Ratio*
Kabupaten Tambrauw Tahun 2010



Sumber: BPS, SP-2010

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah apakah tergolong daerah maju atau daerah yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang

ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Gambar 3.2 memberikan informasi bahwa persentase penduduk produktif dan non produktif baik itu secara agregat maupun gender menunjukkan kecenderungan yang sama. Baik itu penduduk laki-laki maupun perempuan serta total penduduk menunjukkan distribusi yang hampir sama. Besarnya rasio ketergantungan Kabupaten Tambrau mencapai 77,57 persen. Artinya dari 100 orang yang masih produktif (15-64 tahun) harus menanggung beban hidup sekitar 78 orang yang belum produktif (0-14 tahun) dan tidak produktif (65 tahun keatas).

3.1.2 Sebaran Penduduk

Luas wilayah Kabupaten Tambrau mencapai 7.302,39 km² (sumber: Hasil rencana Tim RTRW Kab.Tambrau, Tahun 2010) Luas wilayah Kabupaten Tambrau terdiri dari luas darat pulau utama seluas 5.188,64 km², pulau-pulau kecil seluas 2,03 km² dan lautan seluas 2.111,72 km². Sebagian besar wilayah daratan Kabupaten Tambrau merupakan hutan.

Jika mengacu pada luas pulau darat utama dan pulau-pulau kecil, kepadatan penduduk Kabupaten Tambrau hanya mencapai 1,18 jiwa/ km². Artinya, untuk setiap luas area 1 km², hanya dihuni oleh tidak lebih dari 2 jiwa. Distrik Sausapor merupakan distrik

yang paling padat penduduknya, dengan kepadatan penduduk 4,14 jiwa/ km².

3.2 Ketenagakerjaan

3.2.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja. Sesuai dengan definisi dari BPS laporan ini menggunakan analisis usia kerja 15 tahun ke atas. Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja dan pengangguran.

Tabel 3.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Tambrauw Tahun 2010

Tahun	TPAK		TPAK Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
2010	86,31	68,90	77,84

Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2010

Tabel 3.1 menunjukkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Tambrauw pada tahun 2010 sebesar 77,84 persen. Sedangkan sisanya, yaitu 22,16 persen dari penduduk

usia 15 tahun ke atas merupakan penduduk bukan angkatan kerja, yaitu penduduk usia kerja yang kegiatan utamanya selama seminggu yang lalu sebelum pencacahan adalah bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.

Jika dilihat menurut jenis kelamin, maka TPAK laki-laki di Kabupaten Tambrau lebih besar dari perempuan. TPAK laki-laki dan TPAK perempuan masing-masing sebesar 86,31 persen dan 68,90 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa masih ada masalah gender dalam ketenagakerjaan di Kabupaten Tambrau.

3.2.2 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)

Istilah kesempatan kerja mengandung pengertian lapangan pekerjaan atau kesempatan kerja yang tersedia untuk bekerja akibat dari suatu kegiatan ekonomi atau produksi. Dengan demikian pengertian kesempatan kerja adalah mencakup lapangan pekerjaan yang sudah diisi dan semua lapangan pekerjaan yang masih lowong. Dari lapangan pekerjaan yang masih lowong tersebut timbul kebutuhan tenaga kerja.

Mengingat data kesempatan kerja sulit diperoleh, maka untuk keperluan praktis digunakan pendekatan bahwa kesempatan kerja didefinisikan dengan banyaknya lapangan kerja yang terisi, yang tercermin dari jumlah yang bekerja. Dalam hal ini seseorang dikategorikan bekerja apabila dia melakukan pekerjaan yang

maksudnya untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit 1 (satu) jam dalam seminggu yang lalu, sebelum pencacahan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka yang dimaksud dengan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) yaitu porsi penduduk yang terserap dalam pasar kerja.

Tabel 3.2 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Kabupaten Tambrau Tahun 2010

Tahun	TKK		TKK Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
2010	97,55	97,09	97,35

Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2010

Pada tabel 3.2 di atas ditunjukkan bahwa TKK total untuk Kabupaten Tambrau sebesar 97,35 persen. Jika dirinci menurut jenis kelamin, maka besarnya TKK laki-laki dan TKK perempuan masing-masing adalah sebesar 97,55 persen dan 97,09 persen.

3.2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka (*open unemployment*) merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama

sekali maupun yang sudah pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Pengertian pengangguran tidak dapat disamakan dengan pencari kerja, karena sering kali terjadi di antara pencari kerja terdapat mereka yang tergolong bekerja namun karena berbagai alasan masih mencari pekerjaan lain.

**Tabel 3.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Tambrauw Tahun 2010**

Tahun	TPT		TPT Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
2010	2,45	2,91	2,65

Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2010

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) diartikan sebagai persentase dari jumlah jiwa yang mencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Tabel 3.3 menunjukkan TPT pada tahun 2010 di Kabupaten Tambrauw adalah 2,65 persen di mana TPT laki-laki

lebih besar dari TPT perempuan, yaitu masing-masing sebesar 2,45 persen dan 2,91 persen.

3.2.4 Penduduk Bekerja

Dalam sub bab ini akan dibahas tentang keadaan penduduk bekerja di Kabupaten Tambrauw, yang meliputi tingkat pendidikan, jenis-jenis lapangan usaha dan status pekerjaan utama.

Dari Tabel 3.4 terlihat bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Tambrauw yang bekerja mempunyai pendidikan yang rendah (SD ke bawah), yaitu sebanyak 62,26 persen. Tingginya jumlah penduduk bekerja yang berpendidikan rendah mengindikasikan besarnya penggunaan metode kerja secara tradisional. Jika dirinci secara gender, maka terlihat bahwa lebih dari separuh penduduk perempuan yang bekerja memiliki pendidikan SD ke bawah, yaitu sebanyak 67,92 persen dari total penduduk perempuan yang bekerja.

Penduduk bekerja yang memiliki pendidikan SLTP dan SLTA, masing-masing adalah sebesar 17,11 persen dan 15,07 persen. Sedangkan penduduk bekerja dengan latar belakang pendidikan Perguruan Tinggi (diploma/ universitas) hanya sebesar 5,55 persen.

Tabel 3.4 Persentase Penduduk Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tambrau Tahun 2010

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Persentase		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
SD ke bawah	58,00	67,92	62,26
SLTP	17,14	17,08	17,11
SLTA	18,90	10,00	15,07
Diploma/ Univ	5,96	5,00	5,55
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2010

Lapangan kerja utama yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar di Kabupaten Tambrau adalah lapangan kerja pertanian dimana lebih dari separuh (84,46 persen) tenaga kerja di Kabupaten Tambrau terserap di dalamnya.

Tabel 3.5 Persentase Penduduk Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tambrau Tahun 2010

Lapangan Usaha Utama	Persentase		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pertanian	84,62	84,25	84,46
2. Industri Pengolahan	0,69	0,00	0,39
3. Perdagangan	4,52	4,75	4,62
4. Jasa Masyarakat	7,66	11,00	9,09
5. Lainnya	2,51	0,00	1,43
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2010

Tabel 3.5 memperlihatkan persentase penduduk bekerja menurut status pekerjaan utama di Kabupaten Tambrau tahun 2010. Indikator ini berguna untuk melihat komposisi angkatan kerja berdasarkan status pekerjaannya.

Tabel 3.6 Persentase Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Tambaui Tahun 2010

Status Pekerjaan Utama	Persentase
(1)	(2)
1. Berusaha Sendiri	14,43
2. Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/ Buruh Tidak Dibayar	35,12
3. Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	1,00
4. Buruh/Karyawan/Pegawai	10,42
5. Pekerja Bebas Di Pertanian	0,39
6. Pekerja Bebas Di Non Pertanian	0,00
7. Pekerja Tak Dibayar	38,63
Jumlah	100,00

Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2010

Dari Tabel 3.6 di atas terlihat bahwa status pekerjaan utama penduduk bekerja dengan persentase terbesar adalah status pekerja tak dibayar, yaitu 38,63 persen. Persentase terbesar berikutnya adalah berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar sebanyak 35,12 persen, berusaha sendiri sebanyak 14,43 persen, buruh/ karyawan/ pegawai sebanyak 10,42 persen.

Sedangkan untuk status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar dan pekerja bebas di pertanian masing-masing tidak lebih dari 1 persen.

3.3 Kondisi Kesehatan

Indikator yang dapat digunakan sebagai tolok ukur pembangunan manusia dalam bidang kesehatan adalah manusia sebagai objek pembangunan itu sendiri. Tingkat kesehatan seseorang dapat dilihat dari sejarah kesehatan yang diruntut dari kondisi kesehatannya sejak lahir, balita, anak-anak hingga dewasa. Sedangkan tingkat kesehatan pada masyarakat secara umum dapat dilihat dari tingkat kesakitan atau jumlah keluhan kesehatan, tingkat kematian bayi, penolong kelahiran bayi, dan lain-lain.

Perhatian pemerintah dalam membangun indeks pembangunan manusia di bidang kesehatan, diwujudkan melalui penyediaan fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai. Oleh karena itu, penyediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan menjadi sebuah indikator yang layak untuk dievaluasi.

3.3.1 Indikator Kesehatan

Upaya pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Tambrau selama ini, harus diakui telah memberikan kontribusi secara perlahan terhadap peningkatan indikator derajat kesehatan masyarakat. Namun demikian peningkatan yang terjadi

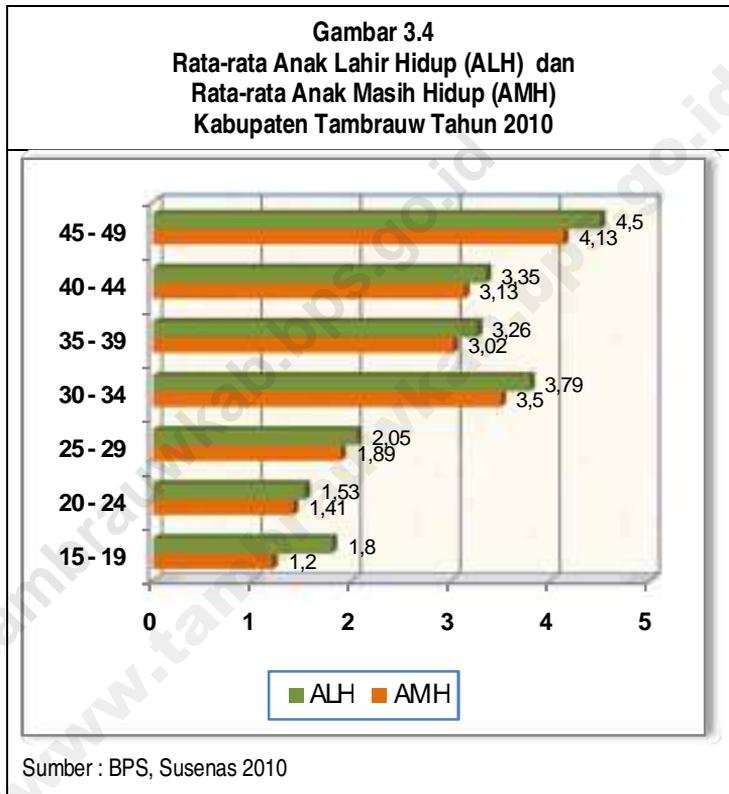
belum sepenuhnya bermakna secara kualitatif terhadap peningkatan status kesehatan masyarakat dan belum memberikan dampak yang nyata terhadap kepuasan pelayanan kesehatan terutama pada masyarakat lapisan bawah. Kenyataan ini tentunya merupakan tantangan selanjutnya yang harus diselesaikan.

Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang pengaruh upaya pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini maka digambarkan dampak yang terjadi melalui beberapa indikator berikut ini.

3.3.1.1 Angka Kematian Bayi

Indikator penting terkait dengan kesehatan adalah angka kematian bayi. Angka kematian bayi berpengaruh kepada penghitungan angka harapan hidup waktu lahir (e_0) yang digunakan dalam salah satu dimensi pada indeks komposit penyusun indeks pembangunan manusia ditilik dari sisi kesehatan. Angka kematian bayi dapat didekati dari data jumlah anak yang lahir hidup dengan jumlah anak yang masih hidup. Berdasarkan data Susenas 2010 tentang data rata-rata anak lahir hidup dengan rata-rata anak masih hidup, terlihat bahwa angka kematian anak tertinggi berada pada kelompok usia wanita antara umur 15-19 tahun. Hal ini dilihat dari selisih rata-rata anak lahir hidup dengan rata-rata anak masih hidup dari wanita kelompok umur 15-19 tahun sebesar 0,60 poin. Gambar 3.4 memperlihatkan rata-rata

anak lahir hidup dan rata-rata anak masih hidup menurut kelompok umur wanita di Kabupaten Tambrauw pada tahun 2010.



3.3.1.2 Imunisasi Balita

Indikator ini digunakan untuk menggambarkan tingkat pelayanan imunisasi lengkap terhadap balita. Pemberian imunisasi pada balita sangat perlu dalam menjaga kekebalan pada tubuh

balita dari berbagai macam penyakit. Imunisasi yang diberikan pada balita di antaranya adalah imunisasi BCG, DPT, Polio, Campak dan Hepatitis B. Tabel 3.3 menunjukkan bahwa persentase balita yang mendapatkan imunisasi yang paling tinggi adalah untuk jenis imunisasi BCG, yaitu sebanyak 84,21 persen. Persentase balita yang mendapatkan imunisasi polio sebanyak 81,95 persen; Hepatitis B sebanyak 77,44 persen; DPT sebanyak 76,69 persen dan campak sebanyak 69,17 persen.

Tabel 3.7 Persentase Balita yang Diberikan Imunisasi menurut Jenis Imunisasi di Kabupaten Tambrauw Tahun 2010

Tahun	Jenis Imunisasi				
	BCG	DPT	Polio	Campak	Hepatitis B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2010	84,21	76,69	81,95	69,17	77,44

Sumber : BPS, Susenas 2010

3.3.1.3 Penduduk Sakit

Indikator ini menunjukkan proporsi dari keseluruhan penduduk yang menderita akibat masalah kesehatan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari selama satu bulan terakhir. Banyaknya

keluhan akibat masalah kesehatan ini digunakan untuk mengukur derajat kesehatan pada masyarakat. Masyarakat dianggap memiliki derajat kesehatan yang semakin tinggi ketika keluhan kesehatan yang dialami semakin sedikit.

Penduduk sakit di Kabupaten Tambauiw pada tahun 2010 sebesar 79,25 persen. Tabel 3.8 menunjukkan bahwa empat keluhan kesehatan utama yang paling banyak dialami oleh penduduk di Kabupaten Tambauiw dalam setahun terakhir adalah batuk, panas, pilek dan sakit kepala berulang, masing-masing sebanyak 33,9 persen; 32,41 persen; 26,95 persen dan 17,75 persen.

Tabel 3.8 Keluhan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Tambauiw Tahun 2010

Tahun	Panas	Batuk	Pilek	Asma/ napas sesak	Diare/ buang air	Sakit kepala berulang	Sakit gigi	Lain- nya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2010	32,41	33,9	26,95	2,14	3,53	17,75	5,24	9,63

Sumber : BPS, Susenas 2010

3.3.1.4 Rata-rata Lama Sakit

Indikator lain yang menggambarkan tingkat kesehatan masyarakat adalah angka rata-rata lamanya sakit. Indikator ini

menggambarkan tingkat intensitas penyakit yang dialami penduduk. Selain itu, indikator ini juga dapat menggambarkan besarnya kerugian yang dialami penduduk karena penyakit yang diderita. Hal ini dapat dijelaskan bahwa banyaknya hari sakit mempunyai hubungan yang berbanding lurus dengan terganggunya aktivitas penduduk yang mengalami sakit sehingga menyebabkan kerugian yang dialami. Atau dengan kata lain, semakin besar nilai indikator ini semakin tinggi tingkat intensitas penyakit yang diderita penduduk dan semakin besar kerugian yang dialami.

Tabel 3.9 Persentase Penduduk yang Menderita Sakit Selama Seminggu yang Lalu Dirinci menurut Jenis Kelamin dan Jumlah Hari Sakit di Kabupaten Tambaouw Tahun 2010

Jenis Kelamin	Jumlah Hari Sakit					Total
	≤3	4 - 7	8 - 14	15 - 21	22 - 30	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laki-laki	68,40	28,14	1,30	2,16	0,00	100
Perempuan	65,09	28,77	2,83	0,94	2,36	100
Lk + Pr	66,82	28,44	2,03	1,58	1,13	100

Sumber : BPS, Susenas 2010

Dari Tabel 3.9 terlihat bahwa pada tahun 2010 secara kumulatif (laki-laki dan perempuan), persentase lamanya hari sakit terbesar adalah pada kategori dengan jumlah hari sakit \leq

3 hari yaitu sebesar 66,82 persen. Pola yang sama ternyata terjadi pada penduduk laki-laki maupun perempuan secara parsial. Persentase penduduk laki-laki dan perempuan dengan jumlah hari sakit ≤ 3 hari masing-masing sebesar 68,40 persen dan 65,09 persen.

Persentase terbesar berikutnya secara kumulatif adalah penduduk dengan jumlah hari sakit 4-7 hari, yaitu sebesar 28,44 persen. Dari Tabel 3.9 terlihat bahwa persentase penduduk yang mengalami sakit akan mengecil seiring semakin banyaknya jumlah hari sakit.

3.3.2 Situasi Sumber Daya Kesehatan

Sumber daya merupakan komponen *input* dari pelayanan kesehatan dalam konteks sebagai suatu sistem. Komponen ini merupakan modal utama yang mutlak diperlukan untuk dapat melakukan proses pelayanan. Secara logis, jika daya dukung komponen sumber daya tersedia dalam jumlah dan kualitas yang cukup maka proses pelayanan seharusnya dapat dilakukan secara optimal.

Perhatian pemerintah dalam membangun indeks pembangunan manusia di bidang kesehatan, diwujudkan melalui penyediaan fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai. Oleh

karena itu, penyediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan menjadi sebuah indikator yang layak untuk dievaluasi.

3.3.2.1 Persalinan Dibantu Tenaga Medis

Salah satu aspek penentu besarnya angka kematian bayi dapat dilihat dari penolong kelahiran. Penolong kelahiran sebenarnya terkait dengan angka kematian bayi dan angka kematian ibu akibat melahirkan. Dalam proses kelahiran bayi tidak dapat dipisahkan antara keselamatan ibu maupun anak yang dilahirkan. Penolong kelahiran yang dilakukan oleh dokter atau tenaga medis lainnya selama ini dianggap lebih baik jika dibandingkan dengan dukun atau famili. Dalam analisis ini digunakan penolong kelahiran terakhir mengingat pada penolong kelahiran terakhirlah terdapat proses kelahiran yang sangat mengandung resiko.

Tabel 3.10 menunjukkan bahwa sebagian besar balita di Kabupaten Tambrau mendapatkan pertolongan kelahirannya oleh tenaga bidan, yaitu sebanyak 38,33 persen. Sebanyak 30 persen balita mendapatkan pertolongan kelahirannya oleh tenaga dukun dan sebanyak 26,67 persen hanya ditolong oleh pihak keluarga (famili).

Tabel 3.10 Persentase Balita menurut Tenaga Penolong Kelahiran di Kabupaten Tambrau Tahun 2010

Tahun	Penolong Kelahiran Terakhir					
	Dokter	Bidan	Tenaga paramedis lain	Dukun	Famili/ Keluarga	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2010	0,00	38,33	5,00	30,00	26,67	0,00

Sumber : BPS, Susenas 2010

3.3.2.2 Fasilitas dan Tenaga Kesehatan

Peningkatan derajat kesehatan penduduk dapat dilakukan dengan meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan. Sampai tahun 2010 belum ada rumah sakit di Kabupaten Tambrau. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan fasilitas kesehatan yang diharapkan dapat menjangkau pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat sampai tingkat kecamatan/ distrik. Selain puskesmas, fasilitas kesehatan lain yang ada di Kabupaten Tambrau di antaranya adalah Puskesmas Pembantu (pustu) dan Puskesmas Keliling. Di Kabupaten Tambrau terdapat 7 Puskesmas, 7 Puskesmas Pembantu (Pustu).

Selain fasilitas kesehatan, hal yang sangat mendukung peningkatan derajat kesehatan adalah ketersediaan tenaga kesehatan atau tenaga medis sebagai subjek yang melakukan pengobatan dan penanganan medis. Jumlah dokter yang ada di Kabupaten Tambrauw sebanyak 11 dokter.

Tabel 3.11 Jumlah Fasilitas dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Tambrauw Tahun 2010

Fasilitas Kesehatan	Jumlah	Rasio (Fasilitas Kesehatan Penduduk/)
(1)	(2)	(3)
1. Rumah Sakit	0	-
2. Puskesmas	7	1 : 878
3. Puskesmas Pembantu	7	1 : 878
4. Puskesmas Keliling	6	1 : 1.024
5. Dokter	11	1 : 559

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw

Jika dilihat dari rasio fasilitas dan sarana kesehatan per penduduk (Tabel 3.11) yang ada di Kabupaten Tambrauw dengan jumlah penduduk sebanyak 6.144 jiwa, maka setiap Puskesmas dan Pustu harus melayani masing-masing 878 jiwa penduduk. dan setiap Puskesmas Keliling harus melayani 1.024 jiwa penduduk.

3.4 Kondisi Pendidikan

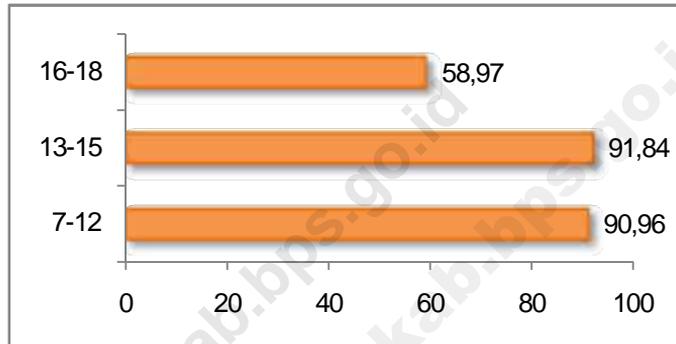
Pembangunan pendidikan di Indonesia dititikberatkan pada peningkatan pelayanan pendidikan dan perluasan jangkauan pelayanan pendidikan. Secara sederhana indikator keberhasilan pembangunan di bidang ini dilihat dari banyaknya penduduk yang buta huruf dan tingkat partisipasi sekolah. Komitmen yang kuat dari pemerintah pusat maupun daerah sangat berperan penting dalam memberantas buta huruf di Indonesia.

3.4.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang telah memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu yang biasa disebut dengan angka partisipasi sekolah (APS). Angka partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah.

Peningkatan APS menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pembangunan, khususnya berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan.

Gambar 3.5
Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur
di Kabupaten Tambrauw Tahun 2010



Sumber : BPS, Susenas 2010

Pada tahun 2010, APS Kabupaten Tambrauw untuk penduduk usia 7-12 tahun mencapai 90,96 persen berarti masih ada sekitar 9,04 persen penduduk usia 7-12 tahun yang tidak dapat mengenyam pendidikan atau putus sekolah. APS untuk penduduk usia 13-15 tahun mencapai 91,84 persen. Sehingga dapat dikatakan bahwa masih ada 9,16 persen penduduk usia 13-15 tahun yang tidak dapat melanjutkan sekolahnya dan atau belum pernah mengenyam pendidikan sekolah. APS untuk penduduk usia 16-18 tahun hanya mencapai 58,97 persen. Berarti masih ada 41,03 persen penduduk usia 16-18 tahun yang tidak dapat

melanjutkan sekolahnya dan atau belum pernah mengenyam pendidikan sekolah.

3.4.2 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Indikator lain yang digunakan untuk mengukur partisipasi sekolah adalah Angka Partisipasi Kasar (APK). APK adalah rasio jumlah siswa berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Misal APK SD sama dengan jumlah siswa yang duduk di bangku SD dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun.

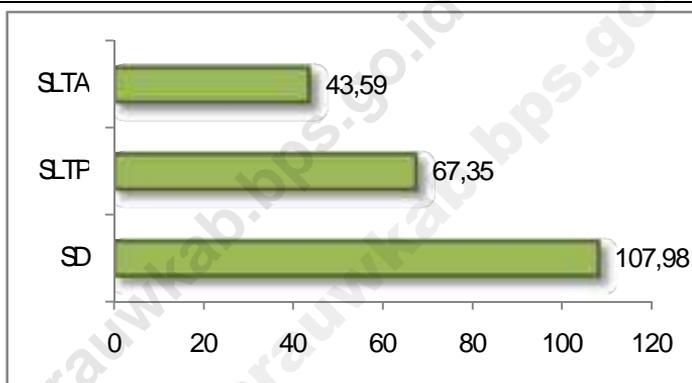
APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

APK untuk jenjang pendidikan SD pada tahun 2010 sebesar 107,98 persen, artinya terdapat penduduk di luar usia sekolah SD (7-12 tahun) yang masih bersekolah SD. Hal ini terlihat dari angka APK SD lebih besar dari 100 persen.

Untuk jenjang pendidikan SLTP, APK sebesar 67,35 persen pada tahun 2010. Hal ini menunjukkan persentase penduduk yang sedang bersekolah di SLTP di antara penduduk berumur 13-15 tahun hanya sebesar 67,35 persen. Sedangkan APK untuk jenjang pendidikan SLTA sebesar 43,59 persen, artinya persentase

penduduk yang sedang bersekolah di SLTA di antara penduduk berumur 16 - 18 tahun sebesar 43,59 persen.

Gambar 3.6
Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Kelompok Umur
di Kabupaten Tambrauw Tahun 2010



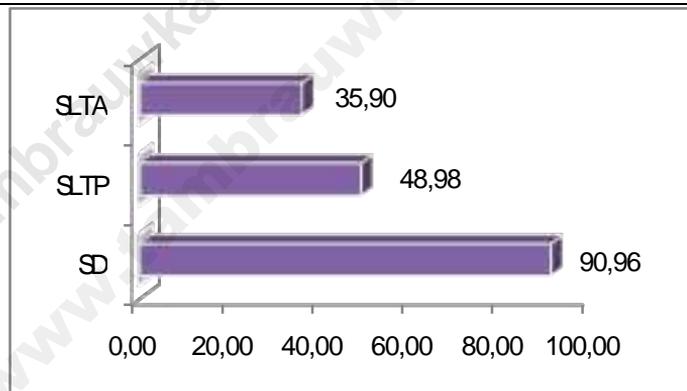
Sumber : BPS, Susenas 2010

3.4.3 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah indikator pendidikan yang digunakan untuk mendeteksi partisipasi penduduk yang bersekolah tepat pada waktunya. APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu.

APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan cara membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Misalkan APM SD merupakan jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah di tingkat SD dibagi dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun.

Gambar 3.7
Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Kelompok Umur
di Kabupaten Tambrauw Tahun 2010



Sumber : BPS, Susenas 2010

Dari Gambar 3.7 di atas, terlihat bahwa APM SD di Kabupaten Tambrauw pada tahun 2010 sebesar 90,96 persen, yang berarti bahwa dari 100 penduduk usia 7-12 tahun, terdapat sekitar 91 orang bersekolah di bangku SD. Sedangkan untuk APM SLTP

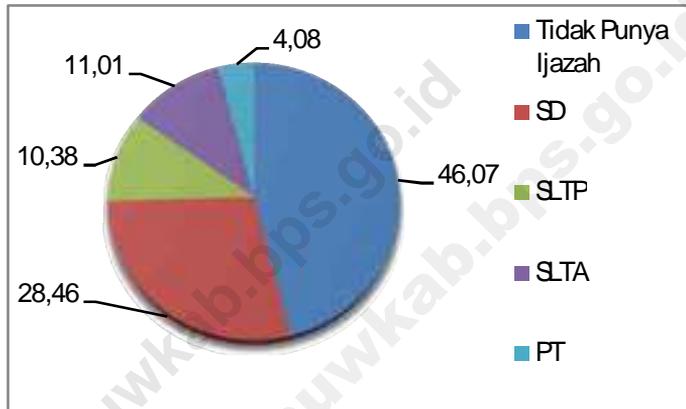
sebesar 48,98 persen, artinya bahwa dari 100 penduduk usia 13-15 tahun, terdapat sekitar 49 orang bersekolah di bangku SLTP. APM SLTA sebesar 35,90 persen, yang berarti bahwa setiap 100 penduduk usia 16-18 tahun, terdapat sekitar 36 orang bersekolah di bangku SLTA.

3.4.4 Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan

Gambaran mengenai peningkatan sumber daya manusia dapat dilihat dari kualitas tingkat pendidikan penduduk usia 10 tahun ke atas. Level pendidikan penduduk diketahui dari tingkat pendidikan yang ditamatkan dengan diidentifikasi melalui ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki. Indikator ini dapat pula digunakan untuk melihat perkembangan kualitas sumber daya manusia dengan mengetahui level tertinggi pendidikan antar waktu dan antar wilayah.

Semakin tinggi tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan maka menggambarkan semakin baik pula kualitas pendidikan manusianya. Hal ini ditandai dengan semakin tingginya persentase penduduk yang berpendidikan tinggi (SLTA keatas). Biasanya terdapat kecenderungan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan maka semakin kecil persentase penduduk yang lulus pada level pendidikan tersebut.

Gambar 3.8
Penduduk 10 Tahun ke Atas menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Tambaui Tahun 2010



Sumber : BPS, Susenas 2010

Secara umum penduduk di Kabupaten Tambaui masih memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Hal ini terlihat pada besarnya persentase penduduk yang berpendidikan SD ke bawah. Lebih dari separuh penduduk berusia 10 tahun ke atas di Kabupaten Tambaui berpendidikan SD ke bawah. Persentase penduduk yang berpendidikan SD ke bawah (yang tidak punya ijazah dan yang tamat SD) sebesar 74,53 persen. Sementara penduduk yang berpendidikan SLTP dan SLTA masing-masing tidak melebihi 12 persen. Sedangkan penduduk yang menamatkan pendidikan di perguruan tinggi hanya mencapai 4,08 persen.

3.4.5 Rasio Murid terhadap Guru dan Sekolah

Rasio murid terhadap guru digunakan untuk melihat perbandingan antara jumlah murid dengan jumlah guru. Rasio ini untuk mengetahui berapa beban seorang guru mengajar sejumlah murid.

Tabel 3.12 Rasio Murid terhadap Guru menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Tambrauw Tahun 2010

Jenjang Pendidikan	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio (Murid/Guru)
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	2.960	118	25,08
SLTP	404	53	7,62
SLTA	105	14	7,50

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tambrauw

Dari Tabel 3.12 terlihat bahwa rasio murid terhadap guru untuk jenjang pendidikan SD adalah sebesar 25,08 artinya bahwa beban seorang guru SD rata-rata mengajar sekitar 25 murid. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SLTP dan SLTA, rasio murid terhadap guru untuk masing-masing jenjang pendidikan tersebut adalah 7,62

dan 7,50. Artinya beban seorang guru SLTP maupun guru SLTA rata-rata mengajar masing-masing 7 siswa.

Tabel 3.13 Rasio Murid terhadap Sekolah menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Tambrauw Tahun 2010

Jenjang Pendidikan	Jumlah Murid	Jumlah Sekolah	Rasio (Murid/Sekolah)
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	2.960	23	128,70
SLTP	404	5	80,80
SLTA	105	1	105,00

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tambrauw

Rasio murid terhadap sekolah menggambarkan rata-rata daya tampung murid dalam satu sekolah. Rata-rata daya tampung sekolah pada jenjang pendidikan SD tahun 2010 sebanyak 128 murid. Sedangkan sekolah untuk jenjang pendidikan SLTP dan SLTA mempunyai daya tampung murid masing-masing 80 murid dan 105 murid.

3.5 Kondisi Perumahan

Perumahan dan permukiman yang layak, sehat, aman, serasi, dan teratur merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat mutu kehidupan serta kesejahteraan rakyat.

Secara umum, kualitas rumah tinggal ditentukan oleh kualitas bahan bangunan yang digunakan, yang secara nyata mencerminkan tingkat kesejahteraan penghuninya, karena itu aspek kesehatan dan kenyamanan dan bahkan estetika bagi sekelompok masyarakat tertentu sangat menentukan dalam pemilihan rumah tinggal dan ini berhubungan dengan tingkat kesejahteraan penghuninya. Selain kualitas rumah tinggal, tingkat kesejahteraan juga dapat digambarkan dari fasilitas yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kualitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

3.5.1 Luas Lantai

Konsep yang dipakai dalam penghitungan luas lantai pada Susenas adalah mengacu pada luas lantai yang biasa dipakai sehari-hari. Sedangkan bagian-bagian yang tidak digunakan sehari-hari, seperti lumbung padi, kandang ternak dan jemuran tidak dimasukkan dalam penghitungan luas lantai. Untuk bangunan bertingkat, penghitungan luas lantai rumah tangga dilakukan

dengan menjumlahkan luas lantai yang biasa digunakan sehari-hari pada setiap lantai.

Luas lantai rumah yang digunakan oleh rumah tangga di Kabupaten Tambauiw pada umumnya adalah pada kisaran 20 – 49 m², yaitu sebanyak 74,35 persen dari total seluruh rumah tangga. Sedangkan 21,47 persen rumah tangga mempunyai luas lantai yang berkisar antara 50 – 99 m².

Tabel 3.14 Persentase Rumah Tangga menurut Luas Lantai Rumah yang Digunakan di Kabupaten Tambauiw Tahun 2010

Tahun	Luas Lantai (m ²)					Jumlah
	≤19	20-49	50-99	100-149	≥150	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2010	2,09	74,35	21,47	2,09	0,00	100,00

Sumber : BPS, Susenas 2010

3.5.2 Jenis Lantai

Tabel 3.15 memperlihatkan persentase rumah tangga di Kabupaten Tambauiw menurut jenis lantai rumah terluas pada tahun 2010. Sebagian besar rumah tangga memiliki lantai rumah bukan tanah/ bambu, yaitu sebanyak 54,97 persen. Sedangkan

rumah tangga dengan lantai rumahnya berupa tanah dan bambu masing-masing sebanyak 35,08 persen dan 9,95 persen.

Tabel 3.15 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Lantai Rumah Terluas di Kabupaten Tambaui Tahun 2010

Tahun	Jenis Lantai Terluas			Jumlah
	Bukan tanah/ bambu	Tanah	Bambu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2010	54,97	35,08	9,95	100,00

Sumber : BPS, Susenas 2010

3.5.3 Jenis Dinding

Tabel 3.16 memperlihatkan persentase rumah tangga di Kabupaten Tambaui menurut jenis dinding rumah terluas pada tahun 2010. Kondisi perumahan dengan dinding rumah terluasnya berupa tembok dan kayu memiliki persentase yang sama, yaitu 42,41 persen. Sedangkan rumah tangga dengan dinding rumah terluasnya adalah bambu sebanyak 15,18 persen.

Tabel 3.16 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Dinding Rumah Terluas di Kabupaten Tambrauw Tahun 2010

Tahun	Jenis Dinding Terluas				Jumlah
	Tembok	Kayu	Bambu	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2010	42,41	42,41	15,18	0,00	100,00

Sumber : BPS, Susenas 2010

3.5.4 Sumber Penerangan

Tabel 3.17 memperlihatkan persentase rumah tangga menurut sumber penerangan di Kabupaten Tambrauw pada tahun 2010. Persentase rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik PLN sebanyak 38,22 persen. Sebanyak 19,90 persen rumah tangga menggunakan listrik non PLN sebagai sumber penerangan. Sedangkan sisanya adalah rumah tangga yang sumber penerangan utamanya menggunakan pelita/ sentir/ obor dan petromak/ aladin masing-masing persentasenya adalah 32,46 persen dan 9,42 persen.

Tabel 3.17 Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan di Kabupaten Tambrauw Tahun 2010

Tahun	Sumber penerangan					Jumlah
	Listrik PLN	Listrik non PLN	Petromak/aladin	Pelita /sentir/obor	Lain-nya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2010	38,22	19,90	9,42	32,46	0,00	100,00

Sumber : BPS, Susenas 2010

3.5.5 Fasilitas Air Minum

Privatisasi penggunaan fasilitas air minum merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga. Pada umumnya tingkat privatisasi penggunaan fasilitas air minum sendiri akan lebih menjamin kesehatan, kebersihan dan keleluasaan dalam hal penggunaannya.

Dari Tabel 3.18 terlihat bahwa tidak lebih dari separuh rumah tangga di Kabupaten Tambrauw, yaitu sebanyak 33,51 persen rumah tangga menggunakan fasilitas air minum sendiri. Sebanyak 47,12 persen rumah tangga tidak ada fasilitas air minum. Sedangkan rumah tangga yang penggunaan fasilitas air minumnya secara bersama dan secara umum masing-masing sebanyak 15,71 persen dan 3,66 persen.

Tabel 3.18 Persentase Rumah Tangga menurut Penggunaan Fasilitas Air Minum di Kabupaten Tambrauw Tahun 2010

Tahun	Penggunaan fasilitas air minum				Jumlah
	Sendiri	Bersama	Umum	Tidak ada	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2010	33,51	15,71	3,66	47,12	100,00

Sumber : BPS, Susenas 2010

3.5.6 Sumber Air Minum

Sumber air minum utama yang digunakan oleh rumah tangga di Kabupaten Tambrauw pada tahun 2010 adalah dari sumur terlindung. Sebanyak 56,50 persen atau lebih dari separuh dari jumlah rumah tangga di Kabupaten Tambrauw menggunakan sumur terlindung sebagai sumber air minum utama mereka. Persentase rumah tangga yang menggunakan air sungai sebagai sumber air minum utama mereka adalah 20,42 persen. Rumah tangga yang menjadikan mata air terlindung sebagai sumber air minum utama mereka adalah sebanyak 19,37 persen. Sedangkan sisanya adalah rumah tangga yang sumber air minum utamanya dari sumur bor/ pompa, sumur tak terlindung dan mata air tak terlindung dengan persentase keseluruhan tidak mencapai 5 persen.

Tabel 3.19 Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum Utama di Kabupaten Tambrauw Tahun 2010

Ta- hun	Sumber Air Minum					
	Sumur bor/ pompa	Sumur terlindung	Sumur tak terlindung	Mata Air Terlindung	Mata Air Tak Terlindung	Air sungai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2010	0,52	56,50	2,62	19,37	0,52	20,42

Sumber : BPS, Susenas 2010

3.5.7 Fasilitas Tempat Buang Air Besar

Kondisi perumahan tidak terlepas dari fasilitas tempat buang air besar. Tabel 3.20 memperlihatkan persentase rumah tangga di Kabupaten Tambrauw menurut penggunaan fasilitas tempat buang air besar pada tahun 2010. Sebanyak 33,51 persen rumah tangga menggunakan fasilitas tempat buang air besar sendiri dan secara bersama sebanyak 15,71 persen rumah tangga. Sedangkan persentase rumah tangga yang menggunakan fasilitas tempat buang air besar secara umum sebanyak 3,66 persen dan masih ada 47,12 persen rumah tangga yang tidak ada fasilitas tempat buang air besarnya.

Tabel 3.20 Persentase Rumah Tangga menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kabupaten Tambrauw Tahun 2010

Tahun	Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar				Jumlah
	Sendiri	Bersama	Umum	Tidak ada	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2010	33,51	15,71	3,66	47,12	100,00

Sumber : BPS, Susenas 2010

3.6 Pengeluaran dan Konsumsi

Pengeluaran konsumsi setiap anggota rumah tangga dibagi menjadi dua kelompok yaitu pengeluaran konsumsi untuk makanan dan bukan makanan. Besarnya pengeluaran untuk kebutuhan konsumsi setiap rumah tangga pada dasarnya berbeda-beda.

Pada umumnya semakin tinggi tingkat pendapatan, maka pengeluaran konsumsi bukan makanan akan semakin besar, karena seluruh kebutuhan untuk konsumsi makanan sudah terpenuhi. Sebaliknya, semakin rendah tingkat pendapatan maka pengeluaran untuk konsumsi bukan makanan cenderung lebih rendah karena kebutuhan untuk konsumsi makanan masih merupakan prioritas utama.

Semakin tinggi pendapatan cenderung akan menyebabkan terjadinya pergeseran pola konsumsi. Persentase pendapatan yang dibelanjakan untuk konsumsi makanan relatif akan menurun, sebaliknya persentase pendapatan yang dibelanjakan untuk konsumsi bukan makanan akan cenderung meningkat. Dengan demikian dapat diindikasikan bahwa pola konsumsi suatu masyarakat dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat setempat.

Tabel 3.21 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan untuk Makanan dan Bukan Makanan di Kabupaten Tambrauw Tahun 2010

Jenis Pengeluaran	Total Pengeluaran (Rp)	Persentase
(1)	(2)	(3)
a. Makanan	283,35	64,23
b. Non Makanan	157,80	35,77
Kabupaten Tambrauw	441,15	100,00

Sumber : BPS, Susenas 2010

Tabel 3.21 memperlihatkan sebagian besar pengeluaran penduduk Kabupaten Tambrauw pada tahun 2010 digunakan

untuk konsumsi makanan, yaitu sebesar 64,23 persen, yang artinya tingkat pendapatan penduduk di Kabupaten Tambaui masih rendah. Pengeluaran konsumsi non-makanan hanya memiliki porsi sebanyak 35,77 persen.

<https://tambauwkab.bps.go.id>
<http://www.tambauwkab.bps.go.id>

BAB

4

**PENCAPAIAN KINERJA
PEMBANGUNAN
MANUSIA**

BAB IV

PENCAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN MANUSIA

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran nyata hasil pembangunan kapabilitas manusia dalam tiga aspek mendasar pembangunan manusia. Aspek kesehatan yang bermakna mempunyai umur panjang diwakili oleh indikator harapan hidup, aspek pendidikan yang direpresentasikan oleh indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, serta aspek perekonomian yang bermakna kehidupan yang layak digambarkan dengan kemampuan daya beli (paritas daya beli). Ketiga aspek tersebut dianggap mampu untuk merepresentasikan pembangunan manusia sehingga sampai saat ini penghitungan IPM masih menjadi rujukan negara-negara di dunia dalam mengukur perkembangan pembangunan manusia.

Sebagai indeks komposit, perkembangan IPM dari tahun ke tahun sangat dipengaruhi oleh komponen-komponen yang menyusunnya. Kemajuan ini sangat tergantung pada komitmen penyelenggara pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas dasar penduduk yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup.

4.1 Perkembangan Komponen Kesehatan

Perkembangan komponen kesehatan digambarkan dengan indikator Angka Harapan Hidup (*Life Expectancy at Birth*). Angka Harapan Hidup (e_0) adalah perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup (secara rata-rata). Indikator ini seringkali digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal kesejahteraan rakyat di bidang kesehatan. Semakin tinggi Angka Harapan Hidup, memberikan indikasi semakin tinggi kualitas fisik penduduk suatu daerah.

Perkembangan Angka Harapan Hidup dapat digambarkan dengan membandingkannya antar tahun. Sesuai dengan standar UNDP, Angka Harapan Hidup minimum (terburuk) ditetapkan 25 tahun dan untuk angka maksimumnya (ideal) ditetapkan 85 tahun.

Angka Harapan Hidup Kabupaten Tambrauw mengalami kenaikan dari tahun 2009 ke tahun 2010. Pada tahun 2009, Angka harapan hidup mencapai 66,09 tahun, dengan indeks sebesar 68,48. Pada tahun 2010, angka harapan hidup mencapai 66,15 tahun, dengan indeks harapan hidup sebesar 68,58. Sehingga terjadi kenaikan indeks harapan hidup dari tahun 2009 ke 2010 sebesar 2,43 poin.

Gambar 4.1
Angka dan Indeks Harapan Hidup
Kabupaten Tambrauw
Tahun 2009 - 2010



Fakta perkembangan angka harapan hidup per tahun di Kabupaten Tambrauw tercatat tidak melebihi dari satu tahun dalam satu periode waktu satu tahun. Hal ini berarti bahwa kondisi angka kematian bayi (*infant mortality rate*) di Kabupaten Tambrauw termasuk dalam kategori *Hardrock*, artinya dalam waktu satu tahun penurunan angka kematian bayi yang tajam sulit terjadi. Sehingga implikasinya adalah angka harapan hidup yang dihitung berdasarkan harapan hidup waktu lahir menjadi lambat untuk mengalami kemajuan. Hal ini terlihat dari perkembangan angka harapan hidup yang tidak melebihi satu digit dalam kurun waktu

satu tahun. Kondisi seperti ini juga terjadi untuk kondisi Provinsi Papua Barat dan nasional, penurunan angka kematian bayi terjadi secara gradual bahkan mengarah melambat.

4.2 Perkembangan Komponen Pendidikan

Komponen pendidikan dalam penyusunan IPM direpresentasikan oleh angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah.

4.2.1 Perkembangan Angka Melek Huruf

Angka melek huruf (*literacy rate*) adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Angka melek huruf dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media dan menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis.

Dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia, angka melek huruf digunakan sebagai salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan manusia di bidang pendidikan bersama dengan indikator rata-rata lama sekolah. Indikator angka melek huruf ini mempunyai bobot dua kali lebih besar dari indikator rata-rata lama sekolah.

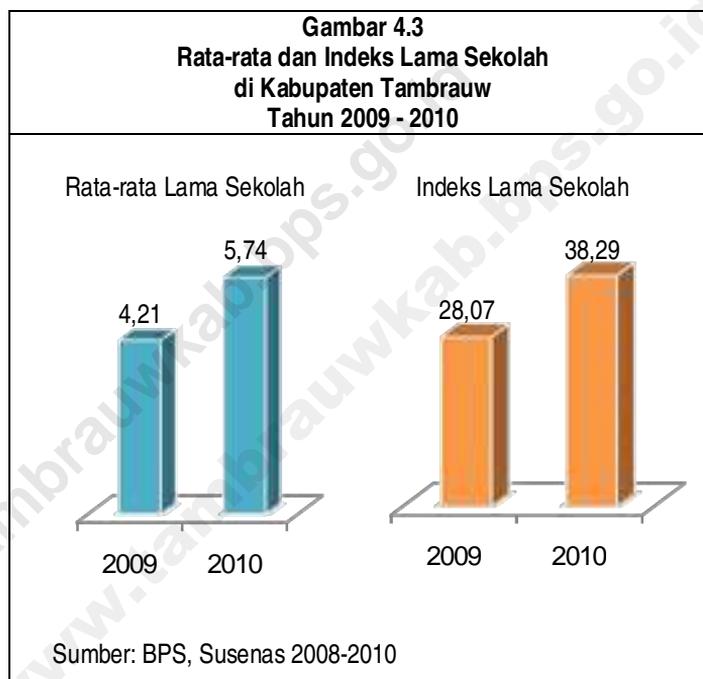
Angka melek huruf Kabupaten Tambrauw tahun 2010 adalah sebesar 77,15 persen, atau mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2009, yaitu 76,38 persen.



4.2.2 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah

Salah satu indikator pendidikan yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan manusia di bidang pendidikan adalah rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*). Rata-rata lama sekolah menunjukkan kemampuan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk umur 15 tahun ke atas. Dalam

penghitungan Indeks Pembangunan Manusia indikator ini merupakan salah satu parameter untuk mengukur indeks pendidikan bersama-sama dengan angka melek huruf.



Pada tahun 2010 rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas adalah 5,74 tahun, artinya bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Tambrauw baru mampu menempuh pendidikan sampai kelas 5 SD atau putus sekolah di kelas 5 SD.

Berdasarkan Gambar 4.3, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tambrauw mengalami peningkatan dari tahun 2009. Pada tahun

2009 rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Tambrauw adalah 4,21 tahun. Indeks lama sekolah mengalami peningkatan sebesar 10,22.

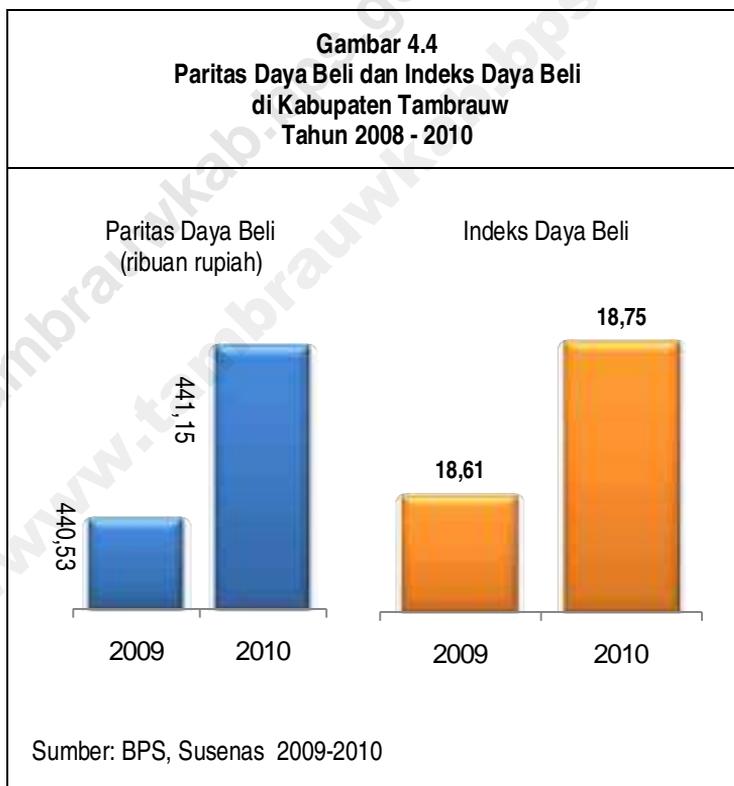
4.3 Perkembangan Paritas Daya Beli

Komponen terakhir yang digunakan untuk penghitungan IPM adalah dimensi ekonomi yaitu kemampuan untuk hidup layak. Komponen ini digambarkan dengan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity*). Daya beli merupakan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uang untuk barang dan jasa. Kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh harga-harga riil antar wilayah karena nilai tukar yang digunakan dapat menaikkan atau menurunkan daya beli.

Untuk itu dalam penghitungan daya beli ini telah menggunakan harga yang telah distandarkan dengan kondisi Jakarta Selatan sebagai rujukannya. Penggunaan standar harga ini untuk mengeliminasi perbedaan harga antar wilayah sehingga perbedaan kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah dapat diperbandingkan.

Paritas daya beli Kabupaten Tambrauw pada tahun 2010 adalah sebesar Rp 441.150,- meningkat seiring dengan semakin tingginya kebutuhan hidup dibandingkan tahun 2009 yang tercatat paritas daya beli sebesar Rp. 440.530,-. Indeks daya beli

meningkat sebesar 0,14 poin dari tahun 2009 ke tahun 2010. Kenaikan paritas daya beli ini diperkirakan dipengaruhi oleh membaiknya kondisi ekonomi penduduk sehingga dengan adanya kenaikan pendapatan tersebut mengakibatkan kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan untuk melanjutkan sekolah dan mengakses fasilitas kesehatan menjadi semakin baik.



4.4 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dihitung secara komposit berdasarkan tiga indeks, yaitu indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks daya beli.

**Tabel 4.1 Komponen IPM Kabupaten Tambrau
Tahun 2009 – 2010**

Komponen IPM	Nilai Komponen		Indeks	
	2009	2010	2009	2010
1. Angka Harapan Hidup	66,09	66,15	68,48	68,58
2. Angka Melek Huruf	76,38	77,15	60,28	64,20
3. Rata-rata Lama Sekolah	4,21	5,74		
4. Paritas Daya Beli *)	440,53	441,15	18,61	18,75
IPM Kabupaten Tambrau			49,12	50,51
IPM Prov.Papua Barat			67,95	69,15

Keterangan:

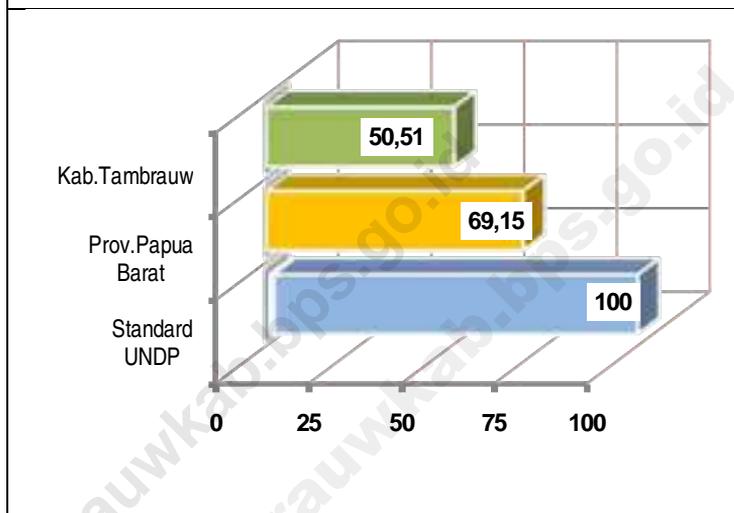
1. e_0 : *Life Expectancy at Birth*/ Angka Harapan Hidup (tahun)
2. LIT : *Literacy Rate*/ Angka Melek huruf (%)
3. MYS : *Mean Years of Schooling*/ Rata-rata Lama Sekolah (tahun)
4. PPP : *Purchasing Power Parity*/ Paritas Daya Beli (ribuan rupiah)

Sumber : BPS

Dari Tabel 4.1, dapat dilihat bahwa IPM Kabupaten Tambrauw mengalami kenaikan dari tahun 2009 – 2010, meskipun nilainya masih di bawah angka rata-rata Provinsi Papua Barat. Pada tahun 2009, IPM Kabupaten Tambrauw sebesar 49,12 dan mengalami kenaikan pada tahun 2010 menjadi 50,51. Dengan demikian IPM Kabupaten Tambrauw mengalami kenaikan sebesar 1,39 poin dari tahun 2009 ke tahun 2010.

Kenaikan IPM pada tahun 2010 dipengaruhi oleh kenaikan ketiga indeks penyusunnya, yaitu indeks kesehatan (yang direpresentasikan oleh indeks harapan hidup), indeks pendidikan (yang direpresentasikan oleh indeks melek huruf dan indeks rata-rata lama sekolah) serta indeks daya beli. Kenaikan IPM serta indeks-indeks penyusunnya ini merupakan capaian kinerja pembangunan manusia di Kabupaten Tambrauw, yang menunjukkan keseriusan pemerintah Kabupaten Tambrauw dalam pembangunan manusia di daerahnya. Berdasarkan pembagian status pembangunan manusia oleh UNDP, maka IPM Kabupaten Tambrauw masuk dalam kategori 'Menengah-Bawah' ($50,0 < \text{IPM} < 65,9$).

Gambar 4.4
IPM Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat
dan Standard Maksimum UNDP



Gambar 4.4 menunjukkan capaian IPM Kabupaten Tambrauw, IPM Provinsi Papua Barat dan standar capaian maksimum IPM yang ditetapkan oleh UNDP (100 persen). Pada tahun 2010, capaian IPM Kabupaten Tambrauw masih berada di bawah IPM Provinsi Papua Barat.

Berdasarkan Tabel 4.2, IPM Kabupaten Tambrauw pada tahun 2010 menempati peringkat terakhir (ke-11) dari seluruh kabupaten/ kota di Provinsi Papua Barat. Kabupaten Raja Ampat adalah kabupaten yang berada tepat satu tingkat di atas Kabupaten Tambrauw dalam pencapaian IPM, dengan IPM sebesar 64,58.

Tabel 4.2 IPM dan Peringkat se-Provinsi Papua Barat Tahun 2010

Kabupaten/ Kota	IPM	Peringkat
(1)	(2)	(3)
Fak-Fak	71,46	2
Kaimana	70,13	3
Teluk Wondama	65,76	9
Teluk Bintuni	66,58	6
Manokwari	67,19	5
Sorong Selatan	66,31	7
Sorong	68,50	4
Raja Ampat	64,58	10
Tambrau	50,51	11
Maybrat	66,00	8
Kota Tambrau	77,18	1
Prov.Papua Barat	69,15	29

Sumber : BPS

BAB

5

IMPLIKASI KEBIJAKAN

BAB V

IMPLIKASI KEBIJAKAN

5.1 Identifikasi Masalah Pembangunan

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan hal yang paling mendasar yang bertujuan untuk menyiapkan manusia sebagai modal utama pembangunan.

Beberapa masalah penting yang perlu diperhatikan di Kabupaten Tambrau adalah masih banyak penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Pencapaian pembangunan manusia pada aspek kesehatan dan pendidikan juga dirasakan masih jauh dari yang diharapkan dan akan ada kecenderungan terjadinya stagnasi jika tidak didukung dengan adanya kerja keras pemerintah dan juga anggaran yang memadai.

Sampai saat ini pemerintah pusat maupun daerah telah melakukan berbagai upaya yang dituangkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan di bidang perekonomian untuk meningkatkan kinerja pembangunan manusia, terutama untuk peningkatan daya beli masyarakat.

Untuk melihat sejauh mana kinerja pembangunan manusia, perlu dilakukan pemantauan terhadap indikator-indikator pembangunan manusia di Kabupaten Tambrau dan mengukur

tingkat pencapaian target pembangunan bidang sosial ekonomi hingga saat ini.

5.1.1 Aspek Kesehatan

Secara umum, permasalahan pembangunan manusia dan pada aspek kesehatan di Kabupaten Tambrau tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. Angka harapan hidup waktu lahir 6,15.
2. Jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesakitan per 100 penduduk masih cukup tinggi, yaitu 79,25.
3. Jangkauan pelayanan kesehatan hingga ke kampung-kampung masih terbatas.
4. Masih tingginya persentase penolong kelahiran yang ditolong oleh tenaga non-medis (dukun dan keluarga).
5. Faktor budaya dan perilaku sosial memegang peran penting dan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian program kesehatan di Kabupaten Tambrau. Rendahnya kesadaran dan tingkat pendidikan masyarakat ditambah perilaku dan budaya masyarakat yang masih tradisional merupakan penghambat utama peningkatan kesehatan masyarakat.

-
6. Faktor pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh aksesibilitas, ketersediaan sarana dan prasarana serta ketersediaan tenaga kesehatan. Permasalahan utama pada faktor pelayanan kesehatan adalah rendahnya pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh masyarakat. Faktor menurunnya kemampuan daya beli masyarakat dan diikuti oleh meningkatnya biaya kesehatan makin menggambarkan rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
 7. Ketidakseimbangan sebaran tenaga kesehatan di daerah terpencil dan daerah perkotaan serta mutu sumber daya kesehatan yang belum dapat mengejar kemampuan perkembangan teknologi kesehatan menjadi sebab pula rendahnya tingkat pemerataan faktor pelayanan masyarakat.

5.1.2 Aspek Pendidikan

Secara umum, permasalahan pembangunan manusia pada aspek pendidikan di Kabupaten Tambrauw tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SD sudah membaik, akan tetapi APM untuk SLTP dan SLTA masih rendah. Hal ini menunjukkan semakin kecilnya peluang seseorang untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
2. Masih terdapat 46,07 persen penduduk berumur 10 tahun ke atas yang tidak memiliki ijazah SD.

-
3. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas adalah 5,74 tahun, artinya bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Tambrauw baru mampu menempuh pendidikan sampai kelas 5 SD atau putus sekolah di kelas 6 SD.

5.1.3 Aspek Pendapatan

Secara umum, permasalahan pembangunan manusia pada aspek pendapatan di Kabupaten Tambrauw tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. Tingginya tingkat kemahalan di Kabupaten Tambrauw jika tidak diikuti oleh peningkatan kemampuan daya beli masyarakat akan membuka kantong-kantong kemiskinan baru.
2. Sumbangan sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tambrauw membutuhkan perhatian lebih. Jika tidak diperhatikan secara serius, sektor ini akan dapat ditinggalkan tenaga kerja muda yang lebih menyukai bekerja di sektor manufaktur dan jasa.

5.2 Upaya Mengatasi Masalah Pembangunan

Setelah dibahas tentang permasalahan yang terjadi dalam pembangunan manusia di Kabupaten Tambrauw, maka perlu diambil langkah-langkah strategis dalam bentuk program kegiatan pada masing-masing sektor dirincikan sebagai berikut :

5.2.1 Strategi Kebijakan pada Aspek Kesehatan

- Untuk menurunkan angka kematian bayi, perlu dilakukan imunisasi serta perbaikan gizi pada balita secara memadai.
- Untuk mengurangi angka sakit maka perlu untuk diadakan program pengobatan gratis, khusus untuk masyarakat miskin dan juga sosialisasi tentang kesehatan lingkungan sekitar.
- Perlu ditambahkan fasilitas kesehatan, seperti puskesmas pembantu (pustu) dan lain-lain yang memadai serta dapat menjangkau masyarakat sampai ke daerah yang terpencil.
- Khusus bagi masyarakat pedalaman, perlu untuk mendapatkan bantuan kesehatan, baik dari segi pembagian obat-obatan gratis dan sosialisasi yang mengajarkan tentang kebersihan dan efek terhadap kesehatan.
- Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, maka perlu ditambahkan petugas kesehatan seperti dokter, bidan, mantri dan tenaga medis lainnya. Juga perlu untuk diadakan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya peran dari tenaga medis dalam peningkatan derajat kesehatan dalam masyarakat.
- Fasilitas kesehatan harus menyebar, sehingga fasilitas kesehatan dapat dinikmati oleh semua orang dari segala tempat.

5.2.2 Strategi Kebijakan pada Aspek Pendidikan

- Peningkatan sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan SLTP dan SLTA perlu diprioritaskan;
- Perlu pengawasan yang lebih ketat terhadap guru-guru yang bertugas di daerah terpencil, serta perlu diperhatikan kesejahteraannya dalam rangka terciptanya peningkatan profesionalisme guru.
- Perlunya dijalin program kemitraan pendidikan non formal dengan swasta;
- Perluasan kesempatan mendapatkan pendidikan melalui program bea siswa dan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh.
- Perlu ditingkatkannya profesionalisme para guru;
- Penyelenggaraan Program kejar Paket A dan Paket B;
- Peningkatan dan pengembangan pendidikan jalur luar sekolah serta SLTP/ SLTA Kejuruan.

5.2.3 Strategi Kebijakan pada Aspek Pendapatan

- Menciptakan inovasi baru dalam hal penciptaan lapangan usaha yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
- Tersedianya lapangan kerja untuk mengatasi masalah pengangguran.

-
- Peningkatan sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung kelancaran distribusi kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat dipedesaan.
 - Pengembangan industri kecil dan menengah yang dapat mengolah bahan baku menjadi bahan jadi dengan memanfaatkan bahan baku setempat.
 - Sub sektor informal perlu digalakkan dan terus dibina oleh pemerintah dengan pemberian kredit lunak serta pembinaan keterampilan.
 - Menumbuhkembangkan koperasi dan pengusaha kecil agar mampu berperan dalam menumbuhkan perekonomian masyarakat.
 - Meningkatkan kemampuan ekonomi kerakyatan melalui industri kecil dan pertanian rakyat.

BAB

6

KESIMPULAN

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting yang dapat digunakan untuk melihat upaya dan kinerja program pembangunan secara menyeluruh di suatu wilayah. Dalam hal ini IPM dianggap sebagai gambaran dari hasil program pembangunan yang telah dilakukan beberapa tahun sebelumnya. Demikian juga kemajuan program pembangunan dalam suatu periode dapat diukur dan ditunjukkan oleh besaran IPM pada awal dan akhir periode tersebut. IPM merupakan ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan wilayah yang mempunyai dimensi yang sangat luas, karena memperlihatkan kualitas penduduk suatu wilayah dalam hal harapan hidup, intelegktualitas dan standar hidup layak.

Dalam perencanaan pembangunan, IPM juga berfungsi memberikan tuntunan dalam menentukan prioritas dalam merumuskan kebijakan dan menentukan program. Hal ini juga merupakan tuntunan dalam mengalokasikan anggaran yang sesuai dengan kebijakan umum yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan dan pengambil keputusan.

Indikator IPM merupakan salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai kualitas pembangunan manusia, baik dari sisi dampaknya terhadap kondisi fisik manusia (kesehatan dan kesejahteraan) maupun yang bersifat non-fisik (intelektualitas). Pembangunan yang berdampak pada kondisi fisik masyarakat diharapkan tercermin dalam angka harapan hidup dan kemampuan daya beli, sedangkan untuk dampak non-fisiknya (intelektualitas) bisa dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh masyarakat. Namun perlu diingat bahwa IPM bukanlah satu-satunya alat ukur untuk menilai keberhasilan dalam pembangunan manusia. Karena dimensi pembangunan manusia yang diukur oleh IPM hanya meliputi tiga indikator saja, yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Secara ringkas, situasi pembangunan manusia di Kabupaten Tambrauw tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Kesehatan

1. Angka harapan hidup Kabupaten Tambrauw dari tahun 2009- 2010 cenderung mengalami peningkatan.
2. Indeks derajat kesehatan Kabupaten Tambrauw sebesar 68,58.

Pendidikan

1. Angka melek huruf selama periode 2009-2010 terus menunjukkan peningkatan.

-
2. Perkembangan rata-rata lama sekolah selama periode 2009 -2010 meningkat dari 4,21 tahun pada tahun 2009 menjadi 5,74 tahun pada tahun 2010. Meskipun demikian, rata-rata lama sekolah termasuk rendah karena rata-rata lama sekolah hanya mencapai kelas 5 SD.
 3. Indeks pendidikan Kabupaten Tambrau sebesar 64,20.

Kemampuan Daya Beli

1. Paritas daya beli Kabupaten Tambrau tahun 2010 sebesar Rp 441.150,- meningkat seiring dengan semakin tingginya kebutuhan hidup dibandingkan tahun 2009 yang tercatat paritas daya beli sebesar Rp 440.530,-.
2. Indeks paritas daya beli tahun 2010 sebesar 18,75.

Gambaran IPM Kabupaten Tambrau Tahun 2010:

1. IPM Kabupaten Tambrau tahun 2010 meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu dari 49,12 menjadi 50,51.
2. Peningkatan IPM Kabupaten Tambrau disebabkan oleh peningkatan ketiga dimensi IPM yaitu umur panjang, pengetahuan dan kemampuan daya beli.
3. IPM Kabupaten Tambrau tahun 2010 menempati peringkat terakhir (ke-11) dari seluruh kabupaten/ kota di Provinsi Papua Barat.
4. IPM Kabupaten Tambrau tahun 2010 termasuk dalam kategori “menengah–bawah”.

6.2 Saran

Dari hasil pencapaian IPM Kabupaten Tambrauw tahun 2010, maka perlu dipacu lagi perkembangannya dengan melihat seluruh komponen pembentuknya, yaitu komponen pendidikan, kesehatan dan ekonomi melalui program pembangunan yang tepat dan terarah. Strategi perencanaan yang komprehensif dalam peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana yang strategis merupakan hal yang sangat diperlukan dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat.

**INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
KABUPATEN TAMBRAUW 2010**

Merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sorong. Data dan informasi yang disajikan terdiri dari situasi pembangunan manusia di Kabupaten Tambrau, hasil penghitungan pencapaian IPM serta implikasi kebijakan terhadap pembangunan manusia.



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SORONG**

Jl. Basuki Rahmat KM. 13,5 Klasaman Sorong - Papua Barat
e-mail : bps9107@bps.go.id